

**KRITIK BUYA HAMKA TERHADAP SISTEM
DEMOKRASI BARAT**

SKRIPSI



Oleh

**MUHAMMAD RAFI DZULFIQRI
NPM : 1831040077**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

KRITIK BUYA HAMKA TERHADAP SISTEM DEMOKRASI BARAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi

Agama

Oleh:

MUHAMMAD RAFI DZULFIQRI

NPM: 1831040077

Prodi : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Drs. Effendi, M. Hum

Pembimbing II : Drs. Agustamsyah M.I.P

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

KRITIK BUYA HAMKA TERHADAP SISTEM DEMOKRASI BARAT

Oleh

Muhammad Rafi Dzulfiqri

Buya Hamka menyoroti bahwa dalam prkatek yang terjadi di Negara bagian Barat kini memiliki model nya didasarkan atas *system* Liberal, dan di dalam *system* liberal seorang individu menjadi sumber pusaran di dalam segala kehidupan social. Pada hal ini pula demokrasi yang berlangsung di Negara barat didasarkan oleh satu factor antara mayoritas dan minoritas. Buya Hamka dengan tegas bahwa dia menolak adanya model demokrasi di bagian Negara barat bahwa di dalam model demokrasi dibagian Negara barat memandang tidak ada sama dengan pengkritikannya tidak adanya keperdulian moralitas bagi setiap individu.

Penelitian yang akan di teliti memiliki fokus metode yang dipakai yaitu kepastakaan atau yang di sebut dengan (library research). Dengan pembahasan Historis serta menggunakan teori rasional sebagai alat rasionalitasnya. Data primer merupakan kumpulan karya-karya Buya Hamka yang terkait dengan judul penelitian seperti, (*Islam dan Demokrasi Umat Islam Menghadapi Tantangan Kristenisasi dan Sekularisasi, Pandangan Hidup Muslim Tafsir Al-Azhar, Islam: Revolusi Ideologi Dan Kedilan Sosial*, sementara data sekunder berupa karya-karya orang lain yang masih memuat terkait variabel judul penelitian ini. Data-data yang diperoleh dikumpulkan dan dipilah pilih diklasifikan untuk sub judul lainnya kemudian dianalisis secara historis deskriptif agar bisa memahami sosok pemikiran Buya Hamka terkait kritiknya terhadap sistem demokrasi barat.

Hasil dari penelitian ini, Buya Hamka menungkapkan bahwa tidak adanya di dalam konsep pemisahan negara dan agama secara pemikiran Buya Hamka ini dapat diartikan keterpisahan, dan hal itu yang menjadi sumber kritikan Buya Hamka. Karena itu maka, Buya Hamka menolak konsep demokrasi yang berasal dari Barat dimana letak fokus Buya Hamka menyadari bahwa demokrasi Barat memiliki cara pandang semua orang itu sama tanpa keterpeduliannya terhadap moralitas Buya Hamka menempuh jalan dengan jalur yang damai dan konstitusional. Dengan adanya debat dan musyawarah untuk mencari jalan solusi dan titik temu oleh karena itulah perjuangan melalui jalan cara seperti ini pernah ada. unsur yang penting di dalam demokrasi yaitu Ketaqwa. Karena itu demokrasi dan Syura itu sama saja. Di dalam tubuh keyakinan musyawarah yaitu agar terciptanya dan memberikan dampak penghilangan dari segala bentuk sistem tirani absolut bahwa mereka mesnarkalkan dari sebuah kekuasaan, karena dari pada itu beranggapan bahwa penguasa sebagai Dewa di alam dunia ini dan untuk menggeser demokrasi tipe Barat.

Kata Kunci: Kritik, Buya Hamka, Sistem Demokrasi Barat, Liberalisme

ABSTRAC

Buya Hamka's criticism of western democracy

By

Muhammad Rafi Dzulfiqri

Buya Hamka be focus in practice that occurred in the State The West now has its model based on the Liberal system, and within the system individual liberalism becomes a source of vortex in all social life. In this case, democracy are place in western countries is based on one factor between majority and minority. Buya Hamka firmly stated that he reject the existence of a democratic model in parts of western countries that in the model democracy in the western part of the world views nothing as the same his criticism of the lack of concern for morality for each individual.

The research will be examined will be focus on the method used, namely literature or what is called (library research). With discussion Historical and using rational theory as a tool of rationality. Primary data is a collection of Buya Hamka's works related to the research title such as, (Islam and Muslim Democracy Facing the Challenge of Christianization and Secularization, Al-Azhar Tafsir Muslim View of Life, Islam: Ideological Revolution and Social Justice, while the secondary data is in the form of the works of other people still contains the variable title of this research. Obtained data collected and sorted selected classified for other subtitles later analyzed descriptively historically in order to understand Buya's figure of thought Hamka regarding his criticism of the western democratic system. The results of this study, Buya Hamka revealed that there was none in the concept of separation of state and religion according to Buya Hamka's thought can be interpreted as separation, and that is the source of Buya's criticism Hamka. Because Buya

Hamka rejected the concept of democracy that originated from the West where the focus lies Buya Hamka realizes that Western democracy have the perspective of all people is the same regardless of their attitude Buya Hamka's morality took a peaceful path and constitutional. With debate and deliberation to find a solution and the meeting point because that's the struggle through the way way like this ever There is. An important element in democracy is Taqwaa. Because it's democracy and Shura are the same. In the body of deliberative belief that is so the creation and effect of eliminating all forms of tyrannical systems absolute that they sanctify from a power, because of that assume that the ruler as a God in this natural world and to shift Western type of democracy.

Keywords: *Criticism, Buya Hamka, Western Democratic System, Liberalism*



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703289

PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rafi Dzulfiqri

NPM : 1831040077

Jurusan/Prodi Studi : Pemikiran Politik Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**KRITIK BUYA HAMKA TERHADAP SISTEM DEMOKRASI BARAT**” benar dan hasil karya saya sendiri tanpa ada unsur plagiat, kecuali beberapa bagian yang disebutkan sebagai bahan rujukan. Apabila dikemudian hari skripsi ini terdapat kejanggalan atau ketidaksamaan dengan hal yang diteliti dari sumber-sumber penelitian ini maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas keteledoran saya serta menerima konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tidak ada unsur paksaan dar pihak manapun.

Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 12 Juni 2023

Yang Menyatakan



Muhammad Rafi Dzulfiqri

NPM: 1831040077



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703289

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KRITIK BUYA HAMKA TERHADAP SISTEM
DEMOKRASI BARAT**

Nama : **Muhammad Rafi Dzulfiqri**

Npm : **1831040077**

Jurusan : **Pemikiran Politik Islam**

Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

Pembimbing I

Drs. Effendi, M. Hum
NIP.195807211986031004

Pembimbing II

Drs. Agustamsyah, M.I.P
NIP. 1978041994037009

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam

Abd. Oohar, M. SI

NIP. 197103122005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703289

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"KRITIK BUYA HAMKA TERHADAP SISTEM DEMOKRASI BARAT."** Di susun oleh Muhammad Rafi Dzulfiqri NPM : 1831040077, Program Studi : **Pemikiran Politik Islam.** Telah di uji dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Pada Hari/Tanggal: **06 Juni 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : DR. SUHANDI, M.AG

Sekretaris : DWI ROSMAWATI, S.TR.KEB., M.KES

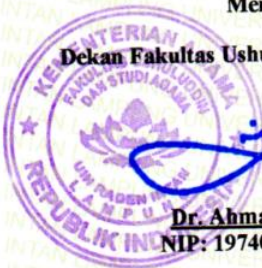
Penguji Utama : ANGGA NATALIA, M.I.P

Penguji Pendamping I : DRS. EFFENDI, M.HUM

Penguji Pendamping II : DRS. AGUSTAMSYAH,

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. Ahmad Isaeni, MA
NIP: 197403302000031001

MOTTO

“Demokrasi yalnızca insanların cesur oldukları ülkelerde var olabilir! Korkak milletler her zaman otoriter rejimler altında yaşarlar!” – **Mehmet Murat İldan**

“Demokrasi hanya bisa dinegara-negara dimana orang-orangnya berani! Bangsa pengecut selalu hidup dibawah rezim otoriter!”

PERSEMBAHAN

Ahamdullilahirobbil'alamin Nikmat sujud dan kalimat syukur yang sangat indah atas rahmat Allah SWT lah memberikan keberkahannya karenanya adanya petunjuk, pemberi segala, kesabaran serta syukur kepada ilmu yang tiada hentinya, rasa syukur yang tidak berkata-kata. Atas keberkehannya yang besar sehingga penulisan skripsi ini lancar. Skripsi ini saya persembahkan khusus kepada orang-orang yang memiliki dampak atas pembuatannya :

1. Kepada pahlawan yang berjasa sebelum saya dilahirkan ke dunia, ia adalah yaitu Mamah tercinta dan yang ditakzimi Nur Umiyah yang telah melahirkan saya, membimbing saya, memberikan kasih sayang kepada saya, mendukung secara moril maupun material, serta tiada henti mendo'akan demi keberhasilan saya. Untuk Abah Muhammad Rifai yang merupakan pahlawan bagi kehidupan saya yang mendidik karakter dan cara berfikir saya hingga saat ini, menuntun saya dalam perilaku, beliau adalah sosok pahlawan pertama dalam hidup saya yang tak tergantikan jeripayah yang di berikan kepada saya dan saya tidak bisa membayar dengan materi kembali kecuali dengan berbakti kepada abah. Abah tidak pernah menyerah demi kebahagiaan anaknya. Kini studi saya sudah selesai berkat do'a dan restu Abahlah, terima kasih Abah sudah menjadi seseorang yang terbaik dalam hidup saya.
2. Teruntuk Adik saya Stani Khairul Umam, Elma Tri Maulida dan si Bungsu Alya Agina, yang paling saya sayangi.
3. Teruntuk Alm H. Syamsuri bin M. Sukra yang telah mendidik saya dimasa kecil ari apa yang telah diberikandan Hj. Saiyah binti M.Taryat yang telah menjadi orang tua dan didikan yang telah diberi sampai awal penulis masuk perkuliahan ditahun 2018.
4. Bagi Jati diri mahasiswa yang berada di almamaternya kepada almamater UIN Raden Intan.

RIWAYAT HIDUP

Nama saya sebagai peneliti adalah Muhammad Rafi Dzulfiqri, di lahirkan di Kota Serang, 14 Maret 2001. Peneliti merupakan anak Sulung dari 4 saudara, dari pasangan Bapak Muhammad Rifai dan Ibu Nur Umiyah.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah :

1. Sekolah Dasar di SDN Cimuncang Cilik Impres, penulis mengikuti ekstrakurikuler karawitan dan pernah menyabet juara 3 se-Kota Serang
2. Peneliti melanjutkan jenang Sekolah Menengah Pertama di SMPNegeri 4 Kota Serang
3. Peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kota Serang disini penulis mengembangkan diri dengan mengikuti ekstrakurikuler non-akademik pencak silat dan mengukir prestasi Juara 3 Untirta Cup, Juara 2 O2SN Tingkat Kota tahun 2016, Juara 3 Kejuaraan Polimedia Cup Seabodetabek Karawang dan Banten, O2SN Tahun 2017, Juara 1 Kejuaraan PIMDA TS ditahun 2018 dan menjadi perwakilan dalam ajang Kejuaraan SMI Cup Word Champion yang diikuti dari berbagai penjuru Negara.
4. Pada tahun 2018 pertengahan peneliti memasuki pendidikan perguruan tinggi di salah satu Universitas Islam Negeri yang bernama UIN Raden Intan Lampung dan memiliki penjurusan prodi Pemikiran Politik Islam di fakultas Ushuluddin, maka untuk menyelesaikannya peneliti memberikan sebuah penelitian yang akan di kaji dengan judul skripsi **“Kritik Buya Hamka Terhadap Sistem Demokrasi Barat.”** Atas kelancaran pengerjaan skripsi ini, banyak sekali ilmu-ilmu yang masih bisa di *peroleh* dari tema tersebut dan men bisa bermanfaat yang tiada henti bilamana di terapkan di dalam sebuah lingkungan kemasyarakatan atau kenegaraan dan kalangan mahasiswa serta bisa dikaji lebih dalam kembali oleh para

peneliti lainnya. penulis melanjutkan keterampilan dibidang non-akademik dan melanjutkan berbagai gelar prestasi di dalam menjadi perwakilan tim inti pencak silat UIN seperti Juara 3 dikejuaraan Pegelaran Cup, Juara 2 dikejuaraan Lampung Championship 3, dan Juara 3 Dalam ajang POMDA LAMPUNG 2019, tidak lantastan bangga diri di dalam universitas penulis menjadi perwakilan di dalam ajang Pra Porprov menjadi keterwakilan Kota dan menjadi Juara 3,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirbilla'alam, syukur nikmat atas kuasanya Allah bagi rahmat, keesaan dan kekuasaannya. Kemudahan, keberkehan-Nya begitu besar, serta arahan qalbu keyakinan sehingga saya sebagai peneliti bisa membedah permasalahan yang bertekankan dalam penelitian ini untuk memenuhi standar dalam pengambilan gelar sarjana di Pemikiran Politik Islam.

Peneliti bahwasanya terselesaikannya skripsi yang berjudul “Kritik Buya Hamka Terhadap Sistem Demokrasi Barat” bahwa adanya beberapa titik kesalahan yang belum tersoroti di dalam penelitian ini, adanya kekurangan ini ada beberapa faktor antara pengetahuan dan pengalaman peneliti yang sangat amat terbatas/skripsi ini sudah dikerjakan dengan semaksimal mungkin dan bilamana ada ketidak sempurnaan, adanya kritik dan saran agar bisa terbangunnya penelitian ini sesuai dengan ranahnya. Pada pembuatan yang dikaji penelitian ini tidak terlepas dari adanya dorongan moril atau materil yang saya ucapkan sebagai peneliti kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D sebagai rektor UIN Raden Intan Lampung karenanya kesempatakn saya sebagai peneliti untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang program S1 ini.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Isnaini, MA Beliau menjabat sebagai Dekan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Abdul Qohar M.Si selaku Ketua Jurusan Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama..
4. Bapak Drs. Effendi, M. Hum. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan dan arahan padapenyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Agustamsyah, M.I.P Selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dari materi dan tatacara penulisan, proses pengerjaan dan melakukan bimbingan

yang saya terima sangatlah tiada kurang dan bisa membimbing saya secara lancar.

6. Seluruh Jajaran Dosen Fakultas Ushuluddin Dan studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terutama dosen jurusan Pemikiran Politik Islam
7. Kepada Sahabat saya Alm. Garin Ananda Pinilih bin Dwi Karyanto yang telah kebersamai dalam proses skripsi saya menjadi rumah tersendiri bagi diri saya ketika pulang ke kampung halaman.
8. Kepada teman seperjuangan Saudara Helmi yang menjadi proses suka duka dari pengajuan judul hingga akhirnya bisa ke tahap akhir ini.

Semoga atas bimbingan dan motivasi serta munajatnya kepada diri ini bersyber dari semua pihak baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum, menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah SWT. Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT meslimpahkan rahmat-Nya serta keberkahan-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga yang lainnya, terkhusus pada program studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandarlampung, 12 Juni 2023

Muhammad Rafi Dzulfiqri

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK..... | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | vi |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | v |
| MOTTO..... | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| RIWAYAT HIDUP..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| C. Fokus dan Sub Fokus..... | 9 |
| D. Rumusan Masalah..... | 11 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 12 |
| H. Metode Penelitian..... | 17 |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 17 |
| 1.) Jenis Penelitian..... | 17 |
| 2.) Sifat Penelitian..... | 18 |

| | | |
|--|---|----|
| I. | Kerangka Teoritik | 21 |
| J. | Sistematika Pembahasan | 24 |
| BAB II DISKURSUS DEMOKRASI BARAT | | 26 |
| A.) | Wajah Peradaban Barat | 27 |
| B.) | Perkembangan Sejarah Demokrasi Barat | 36 |
| C.) | Pandangan Tokoh Terhadap Demokrasi | 44 |
| BAB III BIOGRAFI BUYA HAMKA | | 48 |
| A. | Catatan Latar Belakang Kehidupan Buya Hamka | 48 |
| 1.) | Perkembangan Pribadi dan intelektual Buya Hamka | 50 |
| 2.) | Karya Karya Buya Hamka | 58 |
| BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN BUYA HAMKA | | 63 |
| A) | Hubungan Agama Dan Negara Menurut Buya Hamka | 64 |
| 1.) | Islam dan Demokrasi Menurut Buya Hamka | 72 |
| 2.) | Unsur-Unsur Demokrasi Ala Buya Hamka | 77 |
| a. | Khalifah di muka bumi | 78 |
| b. | Syura dan Demokrasi | 81 |
| c. | Politik harus di dasarkan Akhlak | 84 |
| BAB V PENUTUP | | 89 |
| A) | Kesimpulan | 89 |
| B) | Saran | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 91 |

BAB I

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Di dalam merangkai beberapa variabel dari judul peeliti merangkainya dalam penegasan judul dengan penelitian hal ini memiliki kesinambungan dalam paya perananan memperjelas kearah yang lebih tersudutkan makna variabel judul penelitian dan yang terisi di proposal skripsi ini, sertanya terhindarnya dari kesalah pemahaman dan memudahkan judul yang tertera,maka adanya tahap penulis untuk menguraikan dari arti dan istilah yang terkandung di variabel-variabel karya ilmiah yang berjudul “**KRITIK BUYA HAMKA TERHADAP SISTEM DEMOKRASI BARAT** “ oleh sebab itu penulis menampilkan sebagaimana berikut ::

Kritik, peneliti menjelaskan bahwa Pendefinisian Kritik yang terdapat dalam skripsi Yolanda dan di kutip secara bahasa, Kritik berasal dari bahasa Yunani “*critikos*” yang merupakan istilah untuk adanya yang pembeda kepada kata yang lain dan dari kata ini diturunkan yang berasal dari Yunani Kuno “*krites*” yang bermakna dengan seorang individu menyampaikan argumen, pendapat atau bisa di sebut dengan permaknaan kata analisis.¹ Jadi bisa mendefinisikan kata kritik ini mengandung makna sebuah proses yang secara sadar dari individu dan dengan sengaja menggunakan alat berfikir nya untuk menganalisa² dan mengevaluasi sebuah insiden dari pengalaman yang di tampilkan oleh suatu keadaan yang di tangkap oleh indra untuk memandu keyakinan serta sebuah tindakan dengan sikap refleklifitas, serta adanya kemampuan dalam memberikan alasan secara terorganisir dan mampu mengevaluasinya dengan nilai kualitas suatu alasan secara sistematis.³

¹ YoIandi, Analisis Panggilan Yehezkiel sebagai Penjaga Israel Berdasarkan Teori Kritik Sosial, Skripsi, (Univ di Salatiga: UKSW 2012) 7.

² Mertes, Thinking and Writing, di dalam Jurnal Middle School 22, Yogyakarta: 1991, 24-25.

³ Hossoubah, Cara Berfikir Kreatif dan Kritis, Bandung: Yayasan Nuansa Cendia, 2004, 62.

Buya Hamka Salah satu tokoh Nasional dan Ulama yang berasal dari tanah Maninjau dan dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1908.⁴ Abdul malik yang merupakan tokoh Nasionalis dan Ulama Besar tidak memiliki satu pun pendidikan formal ditamatkannya. Modal awalnya yaitu membaca dalam menempuh pendidikannya, sedari dari awal Buya Hamka melakukan sebuah perkelanaan untuk menimba ilmu kepada tokoh-tokoh dan ahli agama. Walaupun kendati Abdul Malik peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al- Azhar dan Universitas Prof. Moestopo dan Abdul Malik meninggal pada tanggal 24 Juli 1981 di usia 73 Tahun atas penyakit yang dideritanya.⁵

Sistem adalah rangkaian kerja berupa beberapa syarat mekanis untuk memiliki komponen yang memiliki keterhubungannya, berkumpul dan adanya batasan *system* dan tujuan agar bisa terselesaikannya dari bagian yang terkecil dan teridentifikasi oleh suatu sasaran tertentu.⁶

Demokrasi Barat Secara Etimologis, kata demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani dan memiliki dua bentuk kosa kata yaitu *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (*kekuasaan dan kedaulatan*) dan dari perpaduan kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk demokrasi itu sendiri, dimana arti dari hal itu merupakan pemegang kekuasaan tertinggi terdapat di tangan rakyat.⁷ Maka dari itu Demokrasi Barat yang dilahirkan oleh Revolusi Perancis⁸ Dan Demokrasi Barat yang dimaksud adalah Pemisahan dalam pelaksanaan Demokrasi.⁹

Adanya Kritik Buya Hamka yang dimana telah memandang dari Banyak cendekiawan Barat yang menyuaratkan bahwa demokrasi harus sejalan dengan konsultasi, toleransi, dan pemisahan kekuasaan. Yang amat disayangkan dari hal ini, dilapangan cara mekanis demokrasi ini sering disebut-sebut merupakan hasil dari tradisi politik Eropa dan AS. Dengan adanya kompromiskan gagasan politik barat dengan nilai-

⁴ Hamka, Lembaga Hidup, (Jakarta: Republika 2015) Diluh dari synopsis bagian latar belakang buku Hamka

⁵ Haidar Msuyarafa, Buya Hamka Sebuah Novel Biofrafi, (Bandung, Imania, 2018) h.818

⁶ Jogiyanto, 1999, Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan. Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, ANDI Yogyakarta., Yogyakarta h.1

⁷ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, Pacasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, (Indonesian Center For Civid Education: 2010) h. 66

⁸ Zulfikri Suleman, Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta, Kompas, 2010, h. 12-13

⁹ <https://panjimasyarakat.com/2021/07/27/hamka-pemikiran-politik-dan-demokrasi/> Di Lihat pada 13-04-2022 pukul 17:06 WIB

nilai keislaman dan islam yang berada di jalur politik praktik dan jalur dakwah. Praktek sistem demokrasi yang berasal dari Barat yang bertitik tumpu pada kedaulatan kepada manusia di Komparasikan dari sebuah konsep yang berasal dari politik Islam yang dimana bertitik tumpu pada kedaulatan Tuhan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka maksud judul penelitian ini membalas tentang “Kritik Buya Hamka Terhadap Sistem Demokrasi Barat”

B. Latar Belakang Masalah

Pada penelitian yang akan di teliti yaitu dari sosok tokoh bangsa dan ulama yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka dan sebagai titik fokus penelitian adalah Buya Hamka Terhadap Sistem Demokrasi Barat.

Pada awalnya demokrasi ini sudah berdiri dari beberapa asas dan nilai-nilai yang dimana sudah diwariskan kepada demokrasi tersebut dan itu berasal dari masa lampau (Yunani Kuno), dengan gagasan mengenai akan esensi dari demokrasi tersebut.¹⁰ Dan *system* ini sudah terdapat di era Yunani Kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 SM, ha ini adlaah demokrasi secara langsung, dengan suatu tatanan pemerintahan pada era Yunani Kuno dalam hak menjalankan kebijakan politik dan peraturan yang akan dijalankan kepada seluruh perwakilan rakyat dan bertindak sejalan dengan prosedur mayoritas rakyat. Hal yang bisa dijalankan demokrasi secara langsung dan tertib pada masa Yunani Kuno sedang berlangsungnya sebuah kondisi sederhana serta ruang lingkup wilayahnya yang memiliki ketrebatasan serta memiliki masyarakat yang tidak tidak terlalu banyak.¹¹

Demokrasi hadir sebagai suatu *system* politik yang juga mengalami perkembangan dalam pengimplementasiannya.¹² Menyeluruhnya ungkapan teori di dalam penekanan. Siapapun yang memegang kekuasaan di sistem pemerintahan demokrasi adalah rakyat. Dan dari sejarah teorinya, demokrasi memiliki beberapa perseteruan ke arah yang mengerucut bagaimana jika demokrasi ini sebagai sesuatu faktor dari

¹⁰ Riska Muazzinah, Konsep Demokrasi (Studi Komparatif antara Pemikiran Abul A;la Maududi dan Prakteknya di Indonesia), Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019 hlm, 1

¹¹ Ni'matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta,:PT Raja Grafindo Persada,2013), hlm.197

¹² Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.6

sebuah kekuasaan rakyat atau bantuan bagi pembuat ketentuan peraturan.¹³ Setidaknya ada beberapa tahap, dan paling tidak dalam dua tahap, untuk mengambil keputusan, dalam tahap pertama adalah tahap untuk memiliki, dan dalam tahap kedua yaitu tahap pengambilan keputusan. Dari kesemua itu tidak mengherankan di dalam praktek dan bahwa pelaksanaannya pada prinsip-prinsip Negara berdemokrasi. sangat beraneka ragam terlepas dari satu Negara ke dalam kenegaraan. Tidak di pingkiri bahwa jika dilihat dari tujuan dan rangkaian demokrasi merupakan *system* demokrasi ini sebagai sebuah sistem pemerintahan yang sangat populer.¹⁴

Dilihat dari apa yang telah terjadi bahwa kecendrungan praktek yang terjadi secara global bahwa demokrasi bukan lagi sekadar dalam bahan kajian yang dikesampingkan bahkan menjadi wacana para intelek-intelek untuk obsesi politik dari berbagai Negara, terlebih khususnya disuatu wilayah Negara yang sedang memiliki dinamika untuk menuju negara yang maju. Dan sebagai contohnya yaitu Indonesia yang mempraktekan *system* pemerintahan dan berpendudukan Muslim terbesar didunia dan Indonesia menjadi penganut terbesar ketiga dalam bersistem pemerintahan demokrasi setelah Negara terbesar pertama dan kedua yaitu India dan Amerika Serikat.

Perkembangan demokrasi itu sendiri di dalam kenegaraan indonesia telah mengalami dinamika nya tersendiri. Masalah pokok yang dihadapi masalah kultural dan masalah, jika mana di dalam suatu masyarakat yang memiliki beranekaragam pola kebudayaannya. Dan pensistesisan dari Islam dan demokrasi, adanya perspektif Buya Hamka yang mengakui tentang sebuah pendapat dari intelektual Barat disekitar abad ke17-18 dan sebagaimana contoh yaitu Jean Bodin, JJ.Rousseau, John Locke, Mostesquie, dan masih banyak pemikir Barat lainnya, yang hendak menentang persekutuan antara para raja dan kardicardinal sering melakkan penindasan.¹⁵

Adapun kondisi di Barat yang saat ini memiliki kekuatan, dari pada itu semua mereka memiliki permasalahan yang dihadapi yaitu problem legitimasi Amerika Serikat, meskipun mempunyai power yang hebat, dari pada itu semua dimata sebagian besar dunia pada lingkup

¹³ Ni'matul Huda, Ilmu Negara,...,h.207.

¹⁴ Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.6 Loc. it

¹⁵ Hamka, Islam: Revolusi Ideologi..., h. 22

International, memiliki minus tersendiri di dalam legitimasinya. Lebih terkhususkan pada problem dunia yang memiliki permasalahan diantaranya terdapat di tepi jurang dipilhkan dari sebuah pilihan antara legitimasi dan kekuasaan, ada sebuah pilihan yaitu Pemerintahan yang efektif dan otoritatif dengan adanya hal ini hanya bisa jika keduanya saling berhubungan. Dan dari hal inilah ditingkat global tidak akan berjalan, menandakan bahwa demokrasi bisa dikatakan hanya masuk kesebuah jargon belaka. Dimana dengan awal berdirinya PBB untuk mempertahankan strukturnya mencangkup hal-hal yang tidak demokratis. Dan DK PBB inilah yang titik temu dari inti dari PBB dan didominasi oleh lima Negara—AS, Inggris, Prancis, Rusia, China yang memiliki hak istimewa berupa veto dan dimana dalam kasus palestina menunjukkan, bagaimana berulang kali Majelis Umum PBB mengeluarkan berbagai resolusi yang mengutuk Israel, akan tetapi tidak dapat di realisasikan di mentahkan di DK-PBB. Dunia boleh berteriak apasaja tentan ketidakadilan, tentang *double standart*, tentang ketimpangan tatanan perdagangan internasional yang tidak adil. Berulang kali Negara yang tidak keberpihakan antara kekuasaan antara blok yang disebut dengan Negara non blok mereka menyerukan perubahan struktur (restruturisasi) PBB, tetapi tidak ada hasil dan tidak tigubris sama sekali oleh Negara Barat. Dengan adanya hal ini Peletakan antara hubungan internasional melahirkan adanya bentuk nyata bahwa Barat sendiri tidak menghendaki adanya demokrasi, jika demokrasi akan mengurangi kepentingannya.¹⁶

Di tengah perubahan besar yang menerpa indonesia inilah Buya Hamka hidup. Sebagai aktivis pergerakan dan Buya Hamka selalu memperhatikan perkembangan yang terjadi dan memberikan respon terhadap kondisi yang di hadapi dan beurpaya mendilogkan secara intens antara teks yang di hasilkannya dengan peralihan zaman dan

¹⁶ Tentang fungsi dan kekuasaan MU-PBB di atur dalam pasal 10-17 Piagam PBB. Dalam pasal 11 (1) disebutkan bahwa MU dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip umum kerjasama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, termasuk prinsip-prinsip mengenai perlucutan senjata dan pengaturan persenjataan, dan dapat mengemukakan rekomendasi yang bertalian dengan prinsip-prinsip itu kepada Anggota-anggota atau kepada DK-PBB atau kepada kedua-duanya. Akan tetapi, pasal 11 (2) membatasi wewenang MU-PBB, sebab “setiap rekomendasi yang memerlukan suatu tindakan, akan diserahkan kepada DK-PBB.” Dan MU tidak dapat mengajukan rekomendasi yang berkenaan dengan perselisihan atau keadaan itu kecuali apabila DK menghendaki “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional yang di terbitkanoleh Kantor Penerangan PBB Jakarta.

perubahan social demi memberikan landasan ideology bagi kebangsaan indonesia.¹⁷

Adanya era hidup pada beberapa decade yang lalu, dan beberapa tulisannya dari kutipan teks-teks Buya Hamka yang berhasil meramalkan perubahan yang mengemuka dunia islam dewasa ini.¹⁸ Hingga kini, tulisan Buya Hamka masih beredar luas di Tanah Melayu, dan tak habis di situ, Kontribusi Buya Hamka dalam membukumkan Islam belakangan diabadikan dalam sebuah museum yang berdiri di kampung halamannya, Tasek Maninjau, Sumatera Barat.¹⁹ Oleh karena itu, Buya Hamka diposisikan sebagai ulama bagi umat Islam sedunia yang berpengaruh dalam penyelimutan seluruh dunia. Dia tidak bisa semata-mata di pandang sebagai pemikir asal indonesia saja. Akan tetapi, bukan berarti Indonesia tidak terlalu penting dimata Buya Hamka.²⁰

Buya Hamka menyoroti bahwa dalam prkatek yang terjadi di Negara bagian Barat kini memiliki model nya didasarkan atas *system* Liberal, dan di dalam *system* liberal seorang individu menjadi sumber pusran di dalam segala kehidupan social. Bahkan diatas sitem liberal ini memiliki kebebasan dan menentukan sikapnya dalam segala hal sepanjang tidak membuat pertentangan aturan yang sedang di pakai dalam *system* tersebut dan *system* liberal ini memiliki kebebasan dalam menentukan hak pribadinya dan kebebasan hak orang lain.

Pada hal ini pula demokrasi yang berlangsung di Negara barat didasarkan oleh satu factor antara mayoritas dan minoritas, sehingga seorang yang menganut spiritual Islam di Amerika Serikat dan Perancis, dan diungkapkan oleh Roger Garandy pada tahun 1982 dia menyatakan di dalam karyanya bahwa demokrasi yang memiliki type di Negara barat adlah demokrasi yang memiliki karakteristik individualis, statistic dan kuantitatif dengan keberlangsungan secara perwakilan atau bisa dilakukan dengan pembelian. Di dalam ajaran agama islam dan keberlangssungan demokrasi yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa demokrasi model barat tidak perlu untuk

¹⁷ Yusril Ihza Mahendra, Ensiklopedi Pemikiran Yusril Ihza Mahendra 3, (Jakarta: Pro Deleader, tt), h. 298-299

¹⁸ Khairudin Aljunied, Hamka & IslamI, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah) hal. 1

¹⁹ Fauziah Muslimah, "Berkunjung Mesuem Kelahiran Buya Hamka Di Tepian DanauManinjau, "<http://www.gomuslim.co.id/read/destinasi/2016/11/27/2344/berkunjung-ke-museum-rumah-kelahiran-buya=hamka=ditepian-danau-maninjau.html>>(diakses pada 10 juni 2022)

²⁰ Khairudin Aljunied, Hamka & IslamI, 7.

dijadikan landasan karena tidak sesuai dengan karakter ajaran Islam tersebut. Dalam ajaran Islam nafas demokrasi adalah dilakukan dengan musyawarah, bukan hanya dengan suara terbanyak tetapi dengan adanya kualitas dan kebijaksanaan dari diri individu yang menunjukkan dirinya dan disinari oleh ajaran petunjuk ilahi.

Buya Hamka dengan tegas bahwa dia menolak adanya model demokrasi di bagian Negara barat bahwa di dalam model demokrasi dibagian Negara barat memandang tidak ada sama dengan pengkritikannya tidak adanya kepedulian moralitas bagi setiap individu. Baginya karakter dari ketakwaan harus tetap ada dan menjadi penyaringan terlebih menyangkut dalam pembuatan keputusan yang bersifat untuk universal dalam wilayah negaranya tersebut. Dan Buya Hamka menyebutkan bahwa demokrasi dan syura itu merupakan kesamaan dan bagi Buya Hamka adapun demokrasi digemborgemborkan oleh Negara barat dan di populerkankan oleh Negara barat. Namun dalam *role* model demokrasi Negara barat nilai dan akar yang kuat ada di dalam ajaran agama islam baik dilihat dari teologis maupun empiris.

Kesepahaman yang di miliki oleh Buya Hamka pandangan beliau tentang demokrasi Barat tetap ada sebuah notice tersendiri dan perbedaan yang kemudian dikenal dengan istilah Demokrasi Taqwa, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berakar pada Islam. Seperti apa yang tercantum dalam, Selebih dari pada itu di dalam surat *Ali Imran* ayat 159 bahawasanya terdapat pentingnya syurra atau musyawarah di dalam ajaran agama islam dan sebagaimana firman Allah:

”Maka disebabkan oleh rahmat Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

Menghubungkan dari perjalanan yang menjadi tolak ukur yaitu waktu begitu lama Buya Hamka dikenal dengan banyak orang dengan seorang ulama pembaharuan dan sastrawan. Dari pada itu Buya Hamka merupakan sosok multitalent social politik Buya Hamka, yang setiap dari argumen dan gagasan dari kritiknya terhadap demokrasi barat

untuk dikaji dan menjadi perbandingan antara kedua gagasan tersebut untuk menjadi bahan kajian pemikiran politik islam. Dititik inilah urgensi penelitian tentang demokrasi barat yang menuai kritik dari tokoh nasionalisme yaitu Buya Hamka.

Adanya hal-hal yang dikritisi gagasan yang cenderung Sekularisme dan Komunisme karena kebebasan inilah, yang di sebabkan nikah antar agama dan berpindah agama dan dari factor itu mencabang kearah pertentangan totaliarisme pada masa demokrasi terpimpin dan komunisme yang berada di dalam tahun era-kepemimpinan presiden Ir. Soekarno dan berada dititik puncak dan semua upaya kekuatan oposisi sudah disingkirkan.

Masa-masa substansi dalam *system* demokrasi diindonesia yang dipertentangkan oleh Buya Hamka, pada saat kekacauan politik dan disaat keadaan sedang panik dalam dan secara langsung presiden pada saat itu Soekarno mengambil keputusan yang cepat dalam menyelamatkan Negara yang sedang dalam megalami Kekacauan politik, disaat kepemimpinan Soekarno yang memiliki kekuasaan sebagai presiden kepala sebuah Negara, maka dari hal itu sudah memiliki percikan tersendiri untuk peletusan bom yang sangat dahsyat yaitu pada tanggal 5 juli 1959. Dengan didukung oleh para Anggota pertahanan Negara Bersenjata, disaat itu presiden Soekarno mengeluarkan sebuah keputusan yang sangat ditentang oleh para banyak kalangan yang berisikan Dekrit Presiden disaat agenda upacara secara resmi yang dilakukan di istana negara, di dalam memberitakan di dalam isi dari Dekrit ini adalah pembubaran Konstutuanse sebuah peritistiwa pada sebelumnya memiliki pengalaman dari kegagalan dibadan ini dalam membentuk undang-undang yang baru. Pembubaran badan ini, yaitu Konstutuanse ini menandai berlakunya UUD 1945 dalam kerangka awal mula perkembangan dinamika demokrasi terpimpin.²¹ Pada masa-masa itu di dalam periode pemerintahan Idonesia di tahun 1959-1965 kekuasaan di kuasai oleh Presiden walaupun di dalamnya memakai *system* Demokrasi tetapi dijeruji dalam kebebasan demokrasi di Negara Indoensia pada saat itu, terbatasnya peranan partai dan politik, dan perkembangan organisasi dan pemahaman komunis yang secara cepat di jajaran TNI/Polri sebagai unsur penting dalam kepentingan bernegara yang sangat berpengaruh dalam menjaga kestabilan keutuhan Negara bernegara.

²¹ Nugroho Notosusanto, Pejuang dan Prajurit (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), h 99-100

Sebuah pernyataan yang diberikan oleh Buya Hamka dikritik keras oleh Soekarno karena menurut dia, harus dituntut adanya pemisahan yang tegas antara agama, *system* bernegara dan kekuasaan politik. Menurut Soekarno jika Negara disusun atas berdasarkan Islam maka banyak daerah-daerah di wilayah NKRI ini berpisah dan meminta pelepasan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jika dilihat di daerah wilayah Timur Indonesia mayoritas adalah Non-Islam bagaimana jika diterapkan berdasarkan Syariat Islam. Dari pernyataan tersebut presiden Soekarno yang menjabat sebagai kepala Negara yang sah secara konstitusional namun Soekarno mempunyai pilihan sendiri dalam soal Negara. Ia tidak bisa menahan diri ketika para pemimpin Islam mengemukakan bahwa Islam merupakan ajaran yang berada di atas ajaran apapun termasuk Pancasila.

Adanya upaya paradigma dari ketidakterpisahan Agama dan Negara dan paradigma Negara yang dikelola dengan nilai-nilai Islam sebagai sumber hukum. Dengan adanya penggabungan dari praktek sistem demokrasi yang berasal dari Barat, dengan adanya basis tumpu pada kedaulatan manusia dan perbedaan yang mencolok dari apa yang diterapkan oleh konsep politik Islam yang bertitik tumpu pada kedaulatan itu bersumber dari Tuhan dan hal itulah yang disebut Demokrasi Taqwa.

C. Fokus dan Sub Fokus

Apa yang telah di simak oleh peneliti maka untuk memperhatikan ketitikjelasan dan titik fokus dari Latar belakang masalah sebelumnya yang sudah di uraikan, maka bisa diidentifikasi bahwa adanya fokus pada titik permasalahan dengan apa yang terdapat di dalam kajian penelitian penulis uraikan dengan urutan dibawah ini.

1. Sosok Buya Hamka sebagai pemikir politik jarang di ungkap padahal dia merupakan sebagai ulama dan dia menulis banyak karya tentang social dan politik pada zamannya yang jarang di bukukan dan masih berserakan.

2. Kenyataan politik praktis yang selalu menghadirkan masalah tertentu dan sehingga mengakibatkan benturan dari sisi ulama seorang Buya Hamka dan sisi lain kehidupan Buya Hamka sebagai actor politik pada dilemanya antara sikap menerima atau menolak (demokrasi barat) dari pegang teguhnya pada nilai-nilai dan ide yang diyakini.

Padapermasalahan ini yang peneliti teliti bagaimana Buya Hamka menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Kondisi lapangan politik yang selalu mengalami dinamika dan sering kali menciptakan hasil yang tak terduga yang tidak diinginkan oleh para actor nya. Bagaimana cara Buya Hamka berhadapan dengan situasi dinamika yang demikian dan perubahan-perubahan yang terjadi dan demi meraih tujuannya sebagai actor politik hingga ulama dalam permasalahan tersebut (Demokrasi Barat)

4. Nilai-nilai demokrasi barat yang menjadi pertentangan bagi pemikiran Buya Hamka dan dimana Buya Hamka memiliki kritik bagi demokrasi barat.

Pada hal-hal diatas yang telah menjadi pengidentifikasian dan di kelompokkan dari bagian apa saja yang menjadi bahan penelitian yang dikaji dan dari tema di atas sangatlah luas dari pengidentifikasiannya. Untuk itu penelitian yang akan di teliti akan dispesifikasikan kembali dan membatasi dari hal-hal yang akan menjadi pelebaran penelitian khususnya pada hal tertentu pada sisi pemikiran Buya Hamka yang di tekankan pada Tokoh Buya Hamka sebagai tokoh politik dan ulamasekaligus tokoh yang mengkritik ide gagasan demokrasi barat. Di sini juga membahas bagaimana peranannya dalam memeperjuangkan dari perlawanan Buya Hamka terhadap sekularisme yang sebagai ciri khas dari sistem demokrasi barat.

Sementara dalam pemikiran Buya Hamka dibatasi dengan ide dan gagasan Buya Hamka terhadap konsep dan Nilai-nilai khususnya demokrasi dan sekularisme dalam konteks sekularisme, penelitian akan membahas gagasan Buya Hamka antara hubungan Islam dan Negara khususnya dalam demokrasi yang dikaitkan dengan keislaman.

Demikian batasan pada permasalahan yang akan di lakukan sebuah kajian dan penelitian ini maka di mulainya dari adanya pembahasan gagasan Buya Hamka terkait sejarah politik islam, dan terkait di dalam penelitan khususnya islam dan Negara secara transformasi politik. Dan batasan lainnya tidak membahas kajian terkait dengan demokrasi dan islam seperti *Wilayatul Faqih* ala Iran. Karena peneliti masih memepertimbangkan dengan adanya pembahasan ini maka bisa sangat banyak penggabungan atau elaborasi bilamana membahas seputar itu dan perlu kajian lebih luas lagi gagasan Buya Hamka terkait hal itu.

D. Rumusan Masalah

Keseluruhan yang akan menjadi topik permasalahan dari teridentifikasi hal-hal diatas, penelitian ini akan difokuskan permasalahan: “Kritik Buya Hamka Terhadap Sistem Demokrasi Barat” agar lebih sistematis dan mudah, permasalahan yang akan dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Kritik Buya Hamka Terhadap Sistem Demokrasi Barat?
2. Bagaimana Konsep Demokrasi Islam dan Keindonesiaan Perspektif Buya Hamka?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memiliki nilai lain untuk:

1. Menjelaskan bagaimana kritik Buya Hamka terhadap sistem demokrasi barat.
2. Untuk mengetahui konsep Demokrasi yang terkandung dari gagasan Buya Hamka

F. Manfaat Penelitian

Dapat ditarik dari hal-hal yang akan di terangkan bahwa untuk mempertahankan kualitas dari penelitian ini dan untuk memperkaya *khazanah* terutama di segi keislaman khususnya dalam pemikiran politik Islam tidak dilakukan dalam ranah teks akan tetapi melingkupi ranah konteks dan memberikan dampak dari hal yang akan di teliti yaitu kritik Buya Hamka terhadap demokrasi barat, agar sesuai dengan tujuan pemikiran politik islam memandang hal tersebut khususnya Buya Hamka. Kajian pemikiran politik Buya Hamka lazimnya tidak terpaku pada kajian secara Agama tetapi peran Buya Hamka yang menjadi peran politik bagi dinamika politik di Indonesia.

Dan diharapkan dapat membawa manfaat seperti hal di bawah ini:

1. Memberikan konsepsi pelaksana demokrasi barat yang lebih jelas dalam hal ini pandangan Buya Hamka sebagai actor yang mengkritik hal tersebut;
2. Memberikan gambaran terkait gagasan Buya Hamka seputar demokrasi dalam dinamika politik indonesia.
3. Penelitian dalam hal ini membentuk sebuah pemanfaatan atas upaya yang disadari atas sebuah respon kritik Buya Hamka terhadap demokrasi barat terkait adanya pemisahan dan penyatuan antara Agama dan Negara.

4. Memperkaya khazanah pemikiran politik islam khususnya di zaman Buya Hamka, khususnya dalam perkembangan dinamika politik konteksnya yaitu Indonesia.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai salah satu tokoh yang memiliki kepribadian yang multitalenta dari seorang Buya Hamka yang di kenal Haji Abdul Malik Karim Amrullah dengan peran peran yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Dan Buya Hamka seringkali di lihat dan di kaji dari peranan politiknya serta di mulai dari kehidupannya yang bias di kaji dari berbagai segi yang berbeda-beda. Bukan hanya dari sikap dan kepribadian dia semata tetapi dari ide-ide yang dia punyai memiliki dasar untuk di teliti sebagai salah satu objek penelitian. Penelitian penelitian telah di lakukan oleh beberapa peneliti Bahkan sebelum Buya Hamka meninggal dunia. Berdasarkan penelusuran data yang peneliti dapat terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan di antara lain adalah:

1. Sebenarnya di dalam peranan dan perspektik kepolitikan Buya Hamka pernah dikaji oleh para peneliti sebelum penelitian yang mencangkup tentang hal itu. Seperti peneliti Shobahussurur dia telah menyumbangir dalam gambaran awal mula pemikiran politik Buya Hamka dengan hubungan ketidakterpisahan antara Negara dan Agama.²² Dan Peneliti lain memiliki kesimpulan yang serupa dnegan peneliti sebelumnya dan kesimpulan yang sama ini diteliti oleh Marsudi Fitro Wibowo dalam penelitiannya dengan hubungan dua unsur agama dan Negara perspektif Buya Hamka. .

2. Penelitian lain dilakukan Zulkifli Mohd Yusoff dan Abdul Hafiz dengan adanya konsep dari sebuah kekuasaan yang bercorak keislaman khususnya yang terdapat di dalam Tafsir Al-Azhar, hal yang sama pula diteliti oleh peneliti bernama Sarah Larasati dan Muhammad Abdul Fattah tentang partisipasi politik perempuan. Karya-karya ini hanya mengkaji satu tema tertentu tentang gagasan politik Buya Hamka dan menempatkan Buya Hamka sebagai ulama yang ,sekedar' menulis tentang politik, bukan memposisikannya sebagai aktor politik. Namun

²² Shobahussurur, ,Relasi Islam dan Kekuasaan Dalam Perspektif Hamka', Jurnal Asy-Syir'ah, vol 43, no 1, 2009, hlm. 231-245.

demikian, karya-karya itu menjadi kajian pendahuluan bagi penelitian tentang pemikiran politik Buya Hamka.²³

3. Kajian tentang Buya Hamka dalam Desertasi Heri Herdiawanto yang berjudul *Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Buya Hamka tentang Demokrasi dan Dasar Negara Pancasila*,²⁴ di dalam kajian yang sudah diteliti ini merujuk kepada sosok Buya Hamka yang hadir sebagai tokoh yang memiliki jiwa bermoral Agama. Dengan adanya kiprah beliau yang masuk keanggotaan partai Masyumi beliau tidak memiliki kepentingan dalam memperoleh kekuasaan dan eksistensi diri sendiri akan tetapi untuk kemaslahatan dan dakwah beliaulah di dalam syiar agama Islam. Kepribadian dia dalam mempertahankan dan memperjuangkan pandangan ia yang ia yakini benar sebuah konsep Agama dan Negara di dalam forum Konstituante ia mengemukakan pendapatnya dan gagasannya, bukan hanya ucapan belaka akan tetapi janjinya untuk bisa terealisasikan dan menguji kepada diri sendiri dalam mempertahankan konsistensinya yang di adu gagasan kepada tokoh-tokoh di dalam kelompok nasionalis-sekuler tentang pandangan terhadap demokrasi. Dan di dalam penelitian ini Heri mengemukakan bahwa Buya Hamka sudah memperjuangkan gagasannya tentang Demokrasi Taqwa bahwa beliau bisa menjamin dengan adanya Demokrasi Taqwa di dalam hal-hal persamaan, keadilan dan pembatasan kekuasaan bisa terjamin di dalam demokrasi Taqwa dari pada Demokrasi Barat. Akan tetapi, dari hal yang disodorkan oleh Buya Hamka seputar Demokrasi Taqwa yang bertitik tumpu dan memiliki landasan moralitas Agama, maka dari pada itu Buya Hamka menolak dengan tegas bahwa di dalam point Demokrasi Barat hanya berurusan kepada pandangan semua orang sama tanpa peduli dengan moralitas seseorang tersebut. Buya Hamka menyampaikan pendapatnya bahwa dari salah satu point Demokrasi Taqwa ketaqwaan lah yang menjadi penyaring dari ketidakpedulian moralitas, apalagi terkait dengan pembuat keputusan untuk orang banyak.

4. Dalam penelitian lain yang berasal dari Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi dengan judul Moral Hukum dan Nilai Nilai Kebangsaan:

²³ Marsudi Fitro Wibowo, „Relasi Agama dan Negara Perspektif Ulama Indonesia (Konstruksi Gagasan Politik Islam Hamka Pada Tahun 1928-1981)“, disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018

²⁴ Heri Herdiawanto, *Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Hamka tentang Demokrasi dan Dasar Negara Pancasila* disertasi , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021

Sebuah Refleksi Pemikiran Buya Hamka²⁵ di tulis oleh Fokky Fuad²⁶ Menurutnya gagasan Buya Hamka atas moral hokum sangatlah dibutuhkan untuk di tuangkan dalam khazanah pemikiran hokum pada sisiberlawanan muncul paham-paham liberal dan dimana Buya Hamka menempatkan dari sudut pandang yang menarik yang meletakkan konstruktif Islam di antara kedua belah yang saling berhadapan.²⁷

5. Penelitian tentang pemikiran politik Buya Hamka yang terbatas pada tema tertentu juga dilakukan Achmad Suja'i yang membahas tentang sebuah permaknaan dari kata *Khilafah* di dalam tafsir Al-Azhar dalam memperbandingkannya kepada tafsir yang merupakan karya dari Sayyid Quth, maka dari apda itu di dalam kerangka pembahasan pendangan pemikiran politik menurut Buya Hamka masih banyak keterbatasan di dalam tema ini.²⁸ Dan di dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ahmad Hakim fokus kepada titik tema tertentu di dalam pemikiran politik Buya Hamka²⁹ dan M Thalhah Sidik³⁰ Kajian Hakim dan Sidik inilah yang ditekankan adalah kepada sebuah etika politik menurut pandangan Buya Hamka dan terbatas pula dari apa yang diteliti di dalam karya-karya Buya Hamka terkhususkan di dalam Tafsir Al-Azhar. Dan lebih banyak di dalam karya-karya lainnya selain dari pada Tafsir tersebut.

6. Thesis Akmal Rizki Gunawan³¹ Sementara Karyanya membahas dengan sebuah pengertian antara makna negara dan

²⁵ Fokky Fuad, Moral Hukum dan Nilai Nilai Kebangsaan: Sebuah Refleksi Pemikiran Buya Hamka, (Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol 16, Nomor 1 Tahun 2016) hlm. 71

²⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia

²⁷ Fokky Fuad, Moral Hukum dan Nilai Nilai Kebangsaan: Sebuah Refleksi Pemikiran Buya Hamka, (Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol 16, Nomor 1 Tahun 2016) hlm. 72 Op.Cit

²⁸ Achmad Suja'i, 'Konsep Khilafah Dalam Tafsir Sayyid Quthb dan Tafsir Hamka', disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000.

²⁹ Ahmad Hakim dan M Thalhah, Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

³⁰ Sidik, 'Deradikalisasi Pemaknaan Negara dan Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar', Jurnal Analisa, Vol 19, No 1, 2012, hlm. 69-82

³¹ Akmal Rizki Gunawan, Dimensi Politik Tafsir al-Azhar Hamka: Kajian Nilai-nilai Pancasila (Ciputat: Cinta Buku Media, 2016). Terdapat beberapa artikel ilmiah yang membahas tentang politik Hamka, di antaranya: Fokky Fuad, 'Moral Hukum dan Nilai- nilai Kebangsaan: Sebuah Refleksi Pemikiran Buya Hamka', Mimbar Demokrasi, vol 16, no 1, 2016, h. 71-85; Nunu Burhanuddin, 'Konstruksi Nasionalisme Religius: Relasi Cinta dan Harga Diri Dalam Karya Sastra Hamka', Episteme, vol 10, no 2, 2015, h. 353-384; Fokky Fuad, 'Kehancuran Nilai Kemanusiaan Reaktualisasi Pemikiran Hamka Dalam Hukum', Lex Jurnalica, vol 13, no 1, 2016, h. 35-45; Abdul Wahid, 'Sosial Politik Dalam Tafsir Hamka', Conference proceedings, Ar-Raniry International Conference on Islamic Studies (ARICIS) I, Banda Aceh, 26-27 Oktober 2016, h. 328-340.

bagaimana konsep jihad menurut perpektif Buya Hamka dan tertera di dalam tafsir al-Azhar demikian yang hanya mengeksplorasi gagasan politik Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar, padahal selain dalam tafsirnya, gagasan politik Buya Hamka juga tersimpan dalam karya-karya tulisan yang lainnya.

7. Untuk pembahasan dan penelitian yang relevan terdahulu adalah dari di kutip dari Jurnal yang di ketik oleh Shofwan Rozi³² dan Heriwanto³³ dengan jurnal yang berjudul *Demokrasi Barat: Problem Dan Implementasi Di Dunia*, Menurutnya telah terjadi sebuah kecenderungan diantara tokoh-tokoh global dengan adanya gagasan demokrasi yang tidak lagi hanya sebatas kajian dan wacana dari para intelektual saja, akan tetapi lebih dari pada itu adanya sebuah obsesifitas politik dari berbagai negara, apalagi negara negara berkembang yang menjadi penyokong negara negara maju agar bisa menjadi salah satu penyokong sistem demokrasi tersebut. Karena dasar dari demokrasi menurut Heriwanto ada dua hal, adanya perwakilan rakyat yang menjadi penjamin masyarakat dan yang kedua adalah pembagian keterwakilan yang pertama adalah keterwakilan politik dan yang kedua adalah keterwakilan fungsional.³⁴ Sampai dari beberapa mungkin para pemimpin-pemimpin negara dan bangsa-bangsa bisa sesuai dalam rangka menjalankan sebuah sistem demokrasi ini yang bersifat terbuka dan bisa menjadi peluang atas keterbukaan bagi seluruh masyarakat dan elemen lainnya baik dari yang menetap didaerah dan yang lainnya.³⁵

Kajian tentang Buya Hamka dari aspek lainnya juga banyak dilakukan,³⁶ sementara sisi politiknya relatif belum sebanyak bila

³² Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

³³ Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Asturi (STAIMAS) Wonogiri

³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar...*, hlm.317

³⁵ Shofwan, Heri, *Demokrasi Barat Jurnal Al-Aqidah*, Volume 11, Edisi 2, Desember

³⁶ Sebagai contoh: Muhammad Hilmi Jalil dan Fakhrol Adabi Abdul Kadir, *Kepentingan Kesehatan Diri Dalam Pembangunan Insan: Analisis Karya Falsafah Hamka*, *Jurnal Hadari*, vol 5, no 2 2013, h. 69-84; M Roem Rowi, *Hamka Wujudu fi Tafsir al- Qur'a>n al-Kari>m bi Indu>ni>sy> fi> Kita>bihi al-Azha>r*, *Journal of Indonesian Islam*, vol 03, no 2, 2009, h. 421-451; Imam Taufiq, *Membangun Damai Melalui Mediasi: Studi terhadap Pemikiran Hamka Dalam Tafsir al-Azhar*, *Jurnal al-Tahrir*, vol 14, no 2, 2014, h. 297-320; Zul `Azmi Yaakob, *Falsafah Alam Dalam Konteks Falsafah Ketuhanan Menurut Hamka*, *International Journal of Islamic Thought*, vol 1, June 2012, h. 74-86; Abdul Nashir, *Buya Hamka dan Mohammad Natsir Tentang Pendidikan Islam*, *At-Ta'dib*, vol 3, no 1, Shafar 1428, h. 59-81; dan masih banyak lagi.

Ada beberapa artikel untuk forum ilmiah yang membahas Hamka, contohnya: Abdul Hafiz bin Abdullah & Mohd Ya'qub Zulkifli bin Mohd Yusoff, *Islam dan Keadilan Sosial Menurut Pandangan Hamka Dalam Tafsir al-Azhar: Tumpuan Khusus Kepada Kepentingan Zakat*, paper

dibanding dari segi sastra dan agama. Menurut Maarif, hal itu memang Buya Hamka menulis tentang politik hanya sedikit dan masih tersebar dan tidak dibukukan.³⁷

8. Beberapa penelitian selanjutnya yang telah di teliti oleh seorang bernama Affandi, dengan judul yang di kaji adalah “*Konsep Demokrasi Menurut Pandangan Buya Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar*”. Yang terkandung di dalam kajian yang diteliti ini memaparkan bagaimana sosok Buya Hamka adalah seorang sastrawan, tokoh agama, pengarang, dan sekaligus politikus bahkan negarawan. Kepribadian yang multalent yang mengkaji berbagai gerakan-gerakan

9. Penelitian yang dilakukan oleh Heriwanto, dengan judul “*Kritik Abul A-Maududi Terhadap Demokrasi Barat*” yang menjadi publik Ilmiah pada program pengambilan gelar magister dan di dalamnya merujuk menentang kedaulatan demokrasi di Negara barat dan di komparasikan ke ajaran Islam dan sesuai dengan kebutuhan dengan manusia dan tuntunan Tuhan merupakan aturan yang mengatur kehidupan umat manusia. Dan umat Islam tidak perlu meniru ajaran sekuler dan liberal yang berada di Negara Barat karena adakan merusak kehidupan.³⁸

Buya Hamka, semasa perjalanan hidupnya beliau sudah menemukan menciptakan karya-karya yang sangat banyak dan fenomenal baik di bidang sastra, sejarah, filsafat dan tasawuf bahkan mencangkup di ruang lingkup fiqh roman dan sebagian lainnya. Dan yang sangat fenomenal karya beliau adalah suatu Karya yang sangat memiliki pengaruh penafsiran dari Al-Quran yang diberikannya nama “Tafsir Al-Azhar”.³⁹

Dengan demikian, penelitian ini sesungguhnya mencoba memenuhi satu hal penting, dan adanya perbedaan yang sangat signifikan dari judul-judul terdahulu dengan judul penelitian yang akan di teliti dengan bertemakan Buya Hamka yang mengkritik *system* Demokrasi Barat dan bagian yang terpenting yaitu: mengisi dan memperkaya kajian tentang Buya Hamka yang telah banyak dilakukan peneliti-peneliti lain. Di

dipresentasikan di Seminar Sarantau Islam & Kesejahteraan Sejangat, Fakultas Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam, pada 24-25 Februari 2010.

³⁷ Ahmad Syafii Maarif, ‘Hamka, Pribadi Multitalenta...’, hlm. xiv

³⁸ Abul A’la Al Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, trans. And ed. Khurshid Ahmad, (Lahore: Islamic Publications, 1960), h.125-126

³⁹ Yuyun Affandi, “Konsep Demokrasi Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar”, Laporan Penelitian Individu, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), h. 70-89.

aspek ini penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi lobang yang belum sempat dikaji peneliti tentang Buya Hamka, yaitu Kritik Buya Hamka terhadap Sistem Demokrasi Barat.

H. Metode Penelitian

Di dalam menyusun penelitian memiliki suatu metode dan salah satu yang akan di lakukan peneliti untuk dilakukan untuk bisa menempuh dan memiliki korelasi penelitian dengan metode penelitian yang akan di lakukan.⁴⁰ Dengan adanya suatu langkah yang dinilai sistematis dan bisa dikatakan sah secara logis untuk mencatat dan menganalisa sebuah objek kajian dari problemaika yang memiliki titik fokus, sehingga bisa diambil kesimpulan atas analisa tersebut dan menyimpulkan hasil pemecahan permasalahan tersebut.⁴¹

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1.) Jenis Penelitian

Di dalam penelitian yang akan diteliti ini, hal ini menjadikan penelitian yang bersifat kepustakaan atau yang disebut dengan (*library research*) dimana data-datanya di peroleh dari dokumen-dokumen tertulis dan data kualitatif yang telah dikaji oleh beberapa peneliti yang berkaitan dengan judul yang akan di teliti di atas, karena yang akan dikaji adalah seputar konsep-konsep, ide-ide, gagasan atau pemikiran seseorang. Karena itu penelitian ini menggunakan metode histori-deskriptif untuk melihat konteks yang sesuai dengan penelitian yang akan dikaji dari sang actor hidup begitupun adanya literatur dan menganalisa bersifat kritis kepada karya-karya yang bersumber dari jurnal, buku dll. Serta untuk melihat faktor yang menunjang dari kritiknya dari perjalanan peran kehidupan sang actor.

Adanya sebuah analisa dan riset tertentu yang akan ditempuh dengan sebuah jalan membaca literatur tertentu. Beberapa karya-karya dari penulisan tertentu bisa berupa bersumber dari majalah, ataupun publikasi jurnal, dan karya-karya yang memiliki keterhubungan serta kredible dan validasi di dalam keputusannya. Oleh sebab itulah adanya pengumpulan dari beberapa data itu harus dilakukan di sebuah

⁴⁰ M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) h.20

⁴¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012) h.1-2

tempat perpustakaan atau ditempat lainnya yang tersimpan buku-buku seputar judul di atas.⁴²

Dan rujukan awal data yang diinginkan sebuah analisis inilah yang menjadikan sample untuk dilakukannya kedalam penelitian kali ini dan terdapat dua sumber yang pertama sumber primer dan yang ke-dua adalah sumber sekunder. Penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data-data, dokumen-dokumen tertulis dan berbagai macam publikasi.

2.) Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat yaitu historis deskriptif dimana dari sifat penelitian ini memiliki hasil untuk penelitian dan memberikan sebuah gambaran dari data-data yang sudah di analisa dari segi objektif dan akan sekaligus menghasilkan analisa data⁴³ dari konstruksi masa lampau dan memiliki cara yang sistematis dan bertitik fokus ke arah yang objektif, adanya cara yang dilakukan ini membutuhkan pengumpulan dan dilakukan ke tahap evaluasi untuk memverifikasi serta adanya hasil yang sistematis agar bukti-bukti dalam membuat kerangka yang tegak secara fakta dan bisa mendapatkan hasil yang kredibel.⁴⁴ Adanya penelitian sebagaimana konten historis analisis dengan cara menguji motif, objek, kecermatan⁴⁵ dari hasil penelitian secara dialog secara objektif dalam menganalisa seputar⁴⁶ Kritikan Buya Hamka Terhadap Demokrasi Barat.

Dibawah ini merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan disebuah penelitian agar peneliti bisa memberikan gambaran sebagai berikut:

Pertama, langkah awal yang ditempuh dalam awal dari pembahasan maka penulis memberikan penyajian data seputar demokrasi dan sejarah demokrasi barat dan sistem, hal lainnya berupa pandangan secara langsung terhadap pembahasan atau pun pandangan yang secara tidak langsung tetapi masih dalam pembahasan yang sama terkait hubungan pembahasan.

⁴² J.Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran, (Jakarta: PT RINEKACIPTA, 2003), h. 28.

⁴³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012) cet 3, h.44 Op, cit

⁴⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012) cet 12 h.42

⁴⁵ Ibid hal, 42

⁴⁶ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) Edisi 2 hlm, 75

Kedua, penulis akan menjelaskan bagaimana Buya Hamka dan pemikirannya seputar demokrasi dan mengkritisi demokrasi barat, penulis akan menyertakan data dengan rincian :

a. Sumber Primer

Sebagai berikut: *Islam dan Demokrasi*.⁴⁷*Keadilan Sosial Dalam Islam*,⁴⁸*Umat Islam Menghadapi Tantangan Kristenisasi dan Sekularisasi*.⁴⁹*Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*,⁵⁰ dan pernyataan Buya Hamka yang menjadi peranan politik pada eranya menjadi sumber primer selanjutnya⁵¹ Bahkan yang bermut di dalam *Pedoman Masyarakat, Panjdi Masyarakat, Hikmah, dan Gema Islam*.

Banyak dari sumber primer dari pemikiran Buya Hamka tentang pembahasan yang akan di teliti termasuk dalam karya Buya Hamka yang selintas tidak memuat tentang pembahasan penelitian akan tetapi di dalamnya memuat bagian yang akan dibahas oleh peneliti, seperti: *Renungan Tasawuf*,⁵²*Falsafah Hidup*,⁵³*Pandangan Hidup Muslim*,⁵⁴*Lembaga Hidup*,⁵⁵ dan yang menjadi karya momumental pada kehidupan Buya Hamka adalah sebuah karya yang diakui oleh kalangan tokoh nasional dan kalangan tokoh dunia yaitu *Tafsir Al-Azhar* yang pastinya memuat tentang pembahasan terkait hal perpolitikan.

Sementara yang tergolong data **sekunder** dari penelitian kali ini merupakan hasil dari karya-karya dan pemikiran yang bercabang dari hasil orang lain dan memuat tentang Buya Hamka dari pemikiran dan ide-idenya, terutama dalam pemikiran politiknya, seperti: *Ensiklopedia Buya*

⁴⁷ Hamka, *Islam dan Demokrasi*, (Bukittinggi & Medan: Firma Tjerdas, 1946).

⁴⁸ Hamka, *Keadilan Sosial Dalam...*

⁴⁹ Hamka, *Umat Islam Menghadapi*

⁵⁰ Hamka, *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Panjimas.1984)

⁵¹ Buku ini memuat dokumentasi pidato, perdebatan dan situasi dalam siding-sidang di konstituante sejak awal hingga dibubarkan soekarnotahun 1959.

⁵² Hamka, *Renungan Tasawuf*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002). Dalam buku ini ada dua bab yang terkait dengan politik ,Kewajiban dan Akhlak Kaum Muslimin Dalam Bernegara,' dan ,Pemimpin Agama'.

⁵³ Hamka, *Falsafah Hidup*, (Jakarta: Republika, 2015). Terdapat bagian yang terkait dengan politik, ,Keadilan

⁵⁴ Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992). Bab yang terkait langsung dengan politik adalah ,Cinta Tanah Air, Kemanusiaan dan Islam.'

⁵⁵ Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta: Republika, 2015). Ada beberapa bab yang terkait dengan politik di buku ini: ,Hak dan Kewajiban,' ,Kewajiban Kepada Masyarakat,' ,Kewajiban Bertanah Air,' dan ,Islam dan Politik.'

Hamka,⁵⁶ *Biografi Buya Hamka*,⁵⁷ *Politik Buya Hamka* dalam buku *Bunga Rampai Dari Sejarah 3* karya Moh Roem,⁵⁸ *Pembaharuan Pemikiran Buya Hamka Dalam Bidang Aqidah, Tasawuf dan Sosial Politik*,⁵⁹ dll.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah karya-karya orang lain dan kali ini peneliti akan menguatkan sumber sekunder yang di ambil dari buku-buku atau artikel-artikel yang memuat pembahasan terkait yang dikaji pada penelitian ini, dan diantara beberapa karya-karya bisa di masukan kedalam kategori diantaranya: *Islam dan Demokrasi: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*,⁶⁰ *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral*.⁶¹ Dan masih banyak sumber lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya disini.

Data-data yang sudah terkumpul dari primer dan sekunder selanjutnya akan dipilah dan dipilih oleh peneliti agar bisa menentukan keabsahan dan kelayakannya sebagai sumber yang kredible dan bisa dipertanggungjawabkan dengan memperlihatkan keasliannya.

Setelah menjelaskan sumber yang akan menjadi data primer dan sekunder, penulis akan mengkuliti dari Kritikan Buya Hamka Terhadap Sistem Demokrasi Barat, Pembahasan ini dilakukan agar bisa mendapatkan respon lanjutan dari ide-ide yang bersifat filosofis.

c. Teknik Pengumpulan Data

Diantara beberapa langkah khususnya yang akan ditempuh pada sebuah hasil data dan sebelumnya dilakukan pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

⁵⁶ Ai Fatimah Nur Fuad, Anang Rahwiyana, Ilham Mundsir, M. Abdul Halim Sani, Muhih Rosyid, Yusuf, Rifma Ghulam Dzaljad, Imron Ensiklopedia Buya Hamka, (Suara Muhammadiyah)

⁵⁷ Haidar Mustofa, *Buya Hamka Sebuah Novel Biografi* (Penerbit Imania Tangerang Selatan, 2018)

⁵⁸ Mohamad Roem, *Bunga Rampai Dari Sejarah 3*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983)

⁵⁹ Abd Khair, *Pembaharuan Pemikiran Hamka...*

⁶⁰ Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi...*

⁶¹ Remy Madinier, *Partai Masjumi...*

1. Menentukan permasalahan (topic permasalahan)
2. Mengkaji buku literature yang membahas tentang Sistem demokrasi barat secara Universal dan memfokuskan apda kritikan Buya Hamka terkait Sistem Demokrasi Barat
3. Menelusuri dan menghimpun pemikiran Buya Hamka terkait demokrasi dari kritikan nya tersebut.
4. Melacak realita dari perkembangan Demokrasi Barat untuk menambah keabsahan dari perkembangan demokrasi Barat.

d. Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses dalam mengkaji realita *system* demokrasi barat dengan cara deksriptiflah terhadap analisis untuk menggambarkan secara gamblang dan terperinci dari apa yang dikaji dalam sebuah objek melalui data yang telah dikumpulkan dan kemudia dilakukan analisis untuk menyimpulkan secara umum dari pengumpulan data tersebut.

Dan analisis utama menggunakan historis tertentu di dalam penelitian untuk bisa digunakan kedalam penyelidikan kritis terhadap keadaan tertentu, sebuah perkembangan tertentu yang sudah dialami dari masa lampau inilah bisa diukur dari pertimbangan tertentu dan bisa dilakukan cara yang sangat teliti terhadap data data yang real dan memvalidasikan bersumber yang dimulai secara historis serta menghasilkan intepretasi yang bersumber atas penguraiannya.⁶²penulis memiliki keharusan dalam mengemukakan dari permasalahan objek terkait hal ini dan bisa memberikan hasil interprestasinya secara valid dan berupa fakta-fakta yang sudah diperoleh bagaimana permasalahan ini bisa dihadirkan .⁶³

I. Kerangka Teoritik

Di dalam bukunya Uma yang berjudul *Bussines Research* ditahun 1992 dia mengemukakan bahwa di dalam kerangka berpikir merupakan *role* model yang memiliki cara yang secara konseptual dari sebuah teori inilah yang berhubungan-dari berbagai factor dan bisa dihasilkan dari identifikasi tersebut sebagai suatu masalah yang sangat penting. Uma menyebutkan teoritik adalah seperangkat-kalimat atas prinsip-secara universal agar memiliki keterkaitan di susunan realita, Uma menyebutkan fungsi dari teori adalah untuk memaparkan, memprediksi dan menghasilkan adanya

⁶² Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.34.

⁶³ N yoman Dantes, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2012), h.49.

penghubungan diantara beberapa fakta-fakta yang dinilai dari sistematis tersebut.

Kerangka teoritik dalam penelitian ini adanya penggunaan dengan adanya hubungan teori yang di terangkan oleh John Rawls, dimana Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan untuk seluruh masyarakat dan tidak bisa diganggu rasa keadilan tersebut hingga tidak bisa di kesampingkan untuk seorang individu dan bagi seluruh masyarakat, terlebih khusus untuk masyarakat lemah.-Oleh karena itu beberapa bagian dari kalangan memiliki penilaian dari cara pandang Rawls sebagai perspektif “*Liberal-legalitarian of social justice*”

Bahkan di dalam yang terdapat di suatu tradisi(Barat), demokrasi bisadikatakan sebagai suatu istilah yang memiliki prinsip dan masih bisa untuk diderdebatkan. Seperti pada *system* pemilu pada umumnya yang masih dilakukan adanya multi kepartaian dan terdapat parlemen disuatu dan berlakunya di Negara Inggris dan Prancis yang tidak bisa diterima dalam skala global dan bagi Negara yang menggunakan *system* demokrasi dan sebagai satusatunya *role* model demokrasi. Bahkan perkembangan peristiwa revolusi di perancis, misalnya pada kaum Babouvouis yang telah memiliki peranan dalam mengembangkan *role* model *system* epemrintah yang telah banyak dianut oleh kebanyakan Negara didunia yaitu demokrasi “antiparlemen plebisitan” yang terpenting dalam *role* model ini pada model ini yang telah mempengaruhi *system* politik yang berada dibagian Eropa dalam jangka waktu yang sangat lama, dan pada *role* model ini merupakan alternative *system* dalam bagian utama di Barat yang telah ditawarkan paham Marxis, Marx percaya bahwa di dalam pemerintahan yang demokrasi pada dasarnya tidak akan bisa berjalan di dalam masyarakat yang menganut kapitalis. Karena baginya Negara kapitalis itu tidak ada kesamaanya dan berbeda jauh dengan *system* parlementer, baginya *system* parlemen justru memberikan dan memicu adanya penghalang antara rakyat yang menjadi perwakilan dan penerima kebijakan yaitu masyarakat umum.⁶⁴

Pada akhir semua itu, di dalam praktek-praktek sebagai aternatif politik Marxis, mengambil dari berbagai bentuk yang mewakili dari beberapa secara prinsip satu model demokrasi di bagian Negara Barat, dikarenakan adanya oerbedaan dengan *role* model yang bernama Sartori

⁶⁴ David Held, *Models of Democracy*, (Stanford, Calif: Stanford University Press, 1987), h. 113, 130.

dengan model-model akibat adanya dukungan dari perwakilan pembuat kebijakan di Negara AS.

Mulainya dari sebuah ruang lingkup yang terbatas diantara model demokrasi, hal itu yang menjadikan bandingan disaat menjalankannya. Sebagaimana contoh yang perlu di pertimbangkan adalah peran finansial atau yang disebut (*money politik*) yang makin kesini dengan perkembangannya semakin pertumbuhan yang semakin besar dan bertambah secara pergerakan kepada sebuah penentuan pemilihan bursa calon yang berada di AS dan hal ini sering dijadikan model *system* pemerintahan demokrasi yang paling ideal. Walaupun yang sangat begitu penting di dalam tradisi budaya politik AS hingga pada saat kenyataannya lebih bisa dikatakan berpengaruh dibandingkan dengan individu-individu memilih dalam menentukan siapa yang berhak dalam menduduki pejabat Negara. Atau dengan adanya pertimbangan hal ini diduga banyaknya negara yang memakai model demokrasi yang berada dalam kultur Barat bahwasanya gugurlah dari pencegahan kasus rasisme antara orang kulit hitam dan non semit. Dan dari makna anti sempit ini di dalam faktanya bahwa hal ini produk barat yang tidak ada sama sekali dan terdapat dalam dunia ajaran agama Islam.

Secara konsep Demokrasi barat dengan pengertian global yang akan menjadi indicator, dan melalui penjabaran demokrasi ini begitu banyak untuk disamakan dengan unsur-unsur yang menjadi patokan utama dalam kebiasaan politik di barat dan AS. Tidak jarang pula bagi beberapa ilmuwan dibidang social mengutarakan pendapatnya dan memberikan landasan bagi penjelasan definisial demokrasi. Di dalam ruang lingkup ini, ada salah satu ilmuwan yang sudah memiliki nama yang terkemuka dia bernama, Giovanni Sartori memberikan sanggahan dalam bentuk pertanyaan; ketika seorang individu berbicara tentang pengalaman negara bagian Barat ini merupakan salah satu kunci dari “Barat atau pengalaman?” dengan sebuah cara lain dari kata tersebutlah bisa menemukan jalan lain untuk menemukan demokrasi diluar skenario Negara Barat. Untuk bisa menghasilkan jawaban dari hal inilah bisa secara jelas dimasukkan kedalam pembahasan dari kajian kajian demokrasi dan memungkinkan untuk dimassudkan untuk mengekskore demokrasi.

Buya Hamka secara tegas dalam pernyataannya untuk menolak konsep sistem demokrasi *role* model barat yang memandang semua orang sama ta

tidak adanya kepedulian diantara beberapa point terlebih khusus yaitu moralitas. Menurut Buya Hamka sebagai sutau aktor politik dan tokoh agama dan beberapa multitalent yang ia kuasai bahwa yang menjadi titik point beberapa unsur dari demokrasi Taqwa yaitu ketaqwaan itu sendiri.

J. Sistematika Pembahasan

Pada pembahasan sistematis untuk bisa menjadi karya tulis, maka penulis membagi kedalam lima bab dalam pembahasannya yaitu sebagaimana dibawah ini:

Bab pertama, adanya pembawaan tentang pendahuluan yang akan mendeskripsikan secara penuh sekitar antara penelitian ini. Bahwa ulasanya apa yang peneliti dibab ini memiliki dari beberapa hal dimulai; LBM (Latar belakang masalah), fokus dan sub fokus, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dengan kata lain, tujuan yang akan di lanjutkan dalam penulisan pada bab kali ini merupakan untuk menunjukkan atas yang akan menjadi sebuah gambaran susunan yang ada dari semua materi penelitian, padahal secara terperinci hasil yang akan menjadi sebuah susunan dari penelitian kali ini merupakan hal-hal yang akan di ulas pada beberapa bab selanjutnya.

Bab kedua akan membahas tentang diskursus perkembangan demokrasi yang terus bergulir dalam dinamika global dan sejarah demokrasi.

Bab ketiga, setelah pada pembahasan selanjutnya pada bab ini akan di muat tentang Biografi Buya Hamka, Latar belakang keluarga dan bagaimana kiprahnya pada perkembangan hidup Buya Hamka itu yang akan mempengaruhi perkembangan kepribadian dan intelektualnya dan di akhir akan memuat tentang karya-karya Buya Hamka dilihat dari sejarah penulisannya.

Bab keempat membahas tentang pemikiran Islam dan Demokrasi Buya Hamka, dan akan menguraikan sisi pemikiran Buya Hamka yang merupakan actor politik dan sebagai ulama yang terkemuka yaitu tentang hubungan antara agama dan Negara. Dan dari sudut ini bisa menghasilkan warna pemikiran Buya Hamka yang merupakan actor politik dan ulama hingga sastrawan, yang dari warna itu bisa menghasilkan pengaruh dari ide-ide dan gagasan tentang demokrasi serta kritikan Buya Hamka tentang demokrasi barat, termasuk perbedaan diantara keduanya dari ide-ide dan gagasan tentang demokrasi.

Pada bab kelima, berisi kesimpulan dari hasil penelitian, yang telah dipaparkan dalam pembahasan bab sebelumnya pada bab ini adanya jawaban dari rumusan masalah yang menjadi factor permasalahan pada penelitian dan penulisan ini.

Pada sistematika pembahasan yang tekah diurai pada kalimat diatas, maka penelitian ini akan terdiri dari lima bab pembahasan, yang pertama pendahuluan, bab kedua perkembangan demokrasi, bab ketiga latar belakang Buya Hamka, bab keempat menguraikan ide-ide dan gagasan Buya Hamka tentang demokrasi dan nilai-nilai demokrasi barat yang menjadi sebuah diskursus demokrasi barat, dan bab kelima akan menganalisa dari rumusan masalah yaitu kritikan Buya Hamka terhadap *system* demokrasi barat.

BAB II DISKURSUS DEMOKRASI BARAT

Diskursus Demokrasi dan Perkembangannya di Indonesia pada sub bagian kali ini akan di paparkan demokrasi dan perkembangannya di Indonesia. Yang memberikan adanya nilai-nilai yang bisa menjadi berbeda dengan tahapan tahapan kulturalisasi dan sosio history bahkan antropologinya. Dengan *system* bernegara atau bentuk pemerintahan, namun dengan dari pada ini demokrasi bisa di alirkan kedalam sebuah *system* yang tidak demokratis kembali. Pembicaraan mengenai karakter umat, aspirasinya, serta kedudukannya dalam Negara Islam yang kan menunjukkan kepada sebuah jalan yang kita menemukan ke dalam sebuah titik antara topic mengenai, yang akan di kaji oleh apra pemikir diantaranya definisi bagaimana hal-hal yang akan di laksanakan bisa terlaksana atau tidak bisa menjadikan tumpuan dalam kegiatan bernegara di khususnya kedalam *system*.⁶⁵

Kebanyakan mayoritas dari ahli politik modern, terutama di dalam Negara-negara yang berlandaskan pada syariat atau sebuah negara Islam merasakan ada sebuah kemiripan jika di hubungkan antara islam dengan demokrasi.⁶⁶ Sambil mengesampingkan rasa dari pradugaan bahwa yang mendorong dari mereka itu semua agar bisa untuk *system* demokrasi merupakan *system* pemerintahan yang menjadikan trend di seluruh negara bagian barat, karena pada awal-akhirnya menggemborkan *system* demokrasi, adanya penelitian dengan menguji serta mengangkat salinan pendapat itu benar. Benar anantara Islam dan demokrasi mendapatkan banyak kesamaan. Namun dari pada itu hanya bisa dicocokkan untuk mendeskripsikan sebagai sisi kesamaan. Namun dari hal itu hanya cocok di deskripsikan sebagai sisi yang di lihat dari nilai keislaman dan sebagai *system* Islam tersebut. Namun, hal yang dari pada mereka ungkapkan adnaya kemiripan dan peminjaman *system* pada titik tertentu menemukan titik perbedaan yang sama persis dilihat dari sisi persamaan yang mereka ungkapkan. Jadi adanya perungkapan kearah yang lebih tepat dari keduanya yaitu jika dilihat dari kedua sisi itu secara persamaan dan perbedaan ada sebuah perbedaan yang signifikan atau ke arah yang bisa untuk dibandingkan dengan sisi-sisi persamaannya.⁶⁷

Pada Bab ini akan di kaji tentang Tentang Diskursus Demokrasi dari History dan bisa berkembang di Bagian Negara-negara Barat, dan ini merupakan hal kajian terpenting dalam mengetahui posisis Nilai-Nilai *system* demokrasi terutama barat hingga bisa berkembang di dalam Negara keindonesiaan. Selebih dari pada itu baru akan memasuki pandangan tokoh yang berhubungan dengan filosofi demokrasi di Bagian Negara-Negara barat

⁶⁵ M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Gemas Insani : Jakarta 2001) hal 306

⁶⁶ Azyumardi Azra, Transformasi Politik Islam : radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi (Jakarta : Prenada & PPIM UIN Jakarta 2016) Hal. 73

⁶⁷ Abdul Munir Mulkan, Perubahan Prilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987 (Rajawali Pers: Jakarta 1989)

dan di keindonesiaan dan diakhiri dengan sub bab yang membahas dinamika perkembangan demokrasi diindonesia pada zaman era-Buya Hamka. Sub bab bagian kali ini merupakan telaah teoritis dari validasi data berupa dokumen dokumen yang telah di bukukan ataupun tidak di bukukan dan memotret bagian bagian terpenting dalam dinamika demokrasi khususnya dalam tatanan *system* barat dan Negara keindonesiaan Era-Buya Hamka. Dan sengaja akan di tampilkan untuk memperlihatkan karakter dari tatanan demokrasi ini yang menjadi problem dari penelitian kali ini.

A.) Wajah Peradaban Barat

Sebagian yang akan dimasukkan dalam penelitian ini maka tidak kecil dari hal itu merupakan dari fakta dan akar dari sejarah peradaban barat dimana akar yang bersumber dari pemahaman demokrasi nilai-nilai yang berkesinambungan dari *Chrysyendom* menuju Liberalisme-Sekularisme istilah yang disematkan pada peradaban barat adalah “Barat secular-libera;”. Hal ini bukan berarti peneliti anti terhadap semua yang berasal dari Barat dan memukul rata melainkan sikap yang kritislah yang menunjukkan adanya nilai-nilai yang proporsional.⁶⁸

Adanya konfrontasi yang menekankan di dalam aspek intelektual hal ini memberikan corak tersendiri karena menjadikan perbedaan diantara beberapa pandangan hidup kaum kaum negara Barat yang menukur kedalam memisahkan negara dan agama dan pandangan hidup orang-orang Muslim dan peradaban yang terdiri diatasnya. Hal ini yaitu Konfrontasi tidak berarti tidak adanya penghubung tertentu untuk memasukkan diantara arsitektur bangunan antara Barat dan Islam. Dikarenakan di dalam konfontasi kontak secara langsung diruntutan waktu ratusan tahun di sebuah peristiwa Perabg Salib yang bertarung di antara dua kubu Muslim dan kristen, karena sudah terjadi interaksi sosio-Historis. Secara sangat amat intensif. Diantara beberapa kategori peradaban ini akan secara terus menerus adanya gesekan dan interaksi antara take and gift satu samalain.

Dimulai Sejak tahun 1970-an adanya cengkraman dari tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran sekuler sudah dicekoki kedalam pendidikan dan ajaran sekolah diindonesia, misalkan dari sejarah yang dimana meninggi-ninggikan gambaran Musthafa Kemal Ataturk sebagaisimbolis dari tokoh pahlawan yang begitu besar jasanya dan seolah-olah tanpa dosa. Artikel-Artikel Buya Hamka *Panji Masyarakat* dalam publik *Dari Hati Ke Hati* yang membuka mata saya tetang persoalan pergulatan peradaban Barat, Kristen, Yahudi, dan Islam.⁶⁹ Dan dari peninggiannya nama Attaturk saya dapat penjelasan dari Buya Hamka.

⁶⁸ Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal (Jakarta : Gema Insani 2006) h. Ix

⁶⁹ Hamka, Studi Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h.76

Kini yang dilihat dari sebuah fenomena berupa “hegemoni Barat” dalam *Islamic Studies* di beberapa penjurur pendidikan yang berada di pendidikan tinggi keislaman dan secara fakta pengakuan itu harus disematkan bahwasanya negara bagian baratlah sudah mempunyai dari aspek keunggulan diliteratur keislaman, mereka telah menyediakan wadah tersendiri dari beberapa ratusan tahun secara literature-literatur keislaman dikaji secara baik dan tentunya hal ini menjadi bahan intospeksi kepada diri sendiri. Menuntun keilmuan tidak perlu ada pemilihan kepada siapa akan belajar dan yang paling utama dari itu semua adalah bagaimana cara pandang kita untuk memahami, antara melihat emas dan besi. Dan sedangkan ironisnya adalah fasilitas kajian di Negara Indonesia sangatlah kurang, dari pada itu semuanya ada hal yang perlu menjadikannya ari sebuah kebutuhan dan untuk menjadi seorang muslim yang taat dan memiliki kualitas perlu adanya pemfokusan diri sendiri terhadap pemahaman Islam itu sendiri dinilai dari segi pengetahuannya di gali secara mendalam serta memiliki pemahaman tentang peradaban Barat yang bisa menjadi elaborasi tersendiri, akan dimulai tidak hanya bisa menjelaskan tetapi membandingkan diantara keduanya. Tahap ini dikarenakan peradaban Barat yang disaat ini sedang memiliki kekuatan di sektor sektor yang memberikan dampak kedalam pemaksaan nilai-nilai Barat itu sendiri dair pandangan hidup dan prodak-prodaknya dari segi ekonomi untuk bisa di nikmati umat manusia.⁷⁰

Disuatu saat lebih tepatnya kedalam zaman kelahiran itu muncul kembali atau yang disebut (Renaissance) di bagian Barat atas sebuah perubahan dari reformasi, adanya perncitraan yang secara intens hadir dan berlanjut hingga fase memberikan nilai buruk dan Morlowes Tamburlaine memberikan tuduhan tersendiri kepada kitab Suci Umat Islam yaitu Al-Qur’an sebagai “karya setan” dan Martin Luther memiliki anggapan bahwa Pemutus kenabian yaitu Muhammad sebagai salah satu tokoh antagonis di dalam realita dan pandangan nya dan memberikan julukan anak setan. Pada zaman pencearahan Barat Voltaire menganggap Muhammad sebagai fanatic, ekstremis, dna pendusta dan Pada zaman skeptic kita ini, sangat sedikit sekali diatas kritik, dan pada suatu hari kita mungkin mengharapkan untuk mendengar bahwa Muhammad tidak pernah ada.” Itu yang di katakana oleh Snouck Hurgronje.⁷¹

Para orientalis yang melakukan kajian-kajian terhadap bidang bidang tertentu seperti teolog dan filsafat islamsejak D.B Mac Donal, Alfred Gullimaune, Montgomery Watt, Majid Fakhry, Henry Corbin, Michael Frank dan lain-lainnya. Diantara asumsi asumsi yang memiliki *framework* yang hamper sama. Diantara asumsi yang umum mereka pegang erat-erat bahwa filsafat, sains, dan hal-hal yang berbaur dengan rasionalitas tidak ada akarnya adalah Islam. Padahal diskursus filsafat di logika tidak ada apa-apanya

⁷⁰ Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal
h. xv

⁷¹ Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal
h. xix

dibandingkan wacana bersifat metafisis pada awal tradisi pemikiran Islam yang berkembang di zaman Nabi dan sahabat. Artinya para Orientalis tidak mau mengakui bahawa pandangan hidup Islam adalah unsur utama dalam perkembangan nya sejarah peradaban Islam itu sendiri.⁷²

Adanya sebuah reaksi dari simpatisme orientalis terhadap sebuah objek islam yang memiliki serta merra menjadikan tokoh-tokoh pemikiran mereka menjadi benar kesleuruhan dan bahkan benar smeua. Sebab, asumsi dan juga pertanggungjawaban dari *framework* di atas merupakan hal pengingkaran dari sebuah tradisi intelektual Islam yang berbasis pada Wahyu. Dan Transmisi Ilmu Pengetahuan melalui sumber yang disebut kabar *mutawatir* tidak diakui oleh mereka sebagai pemvalidasian. Namun Ilmu Pengetahuan mereka “Barat” secaraKajian keislaman nya secara mendalam tetapi mereka mereka pemikirannya teta[fragmentatif. Mereka tidak ada yang menggabungkan antara keislam secara mendalam tidak dihubungkan antara spesifik dengan bersifat umum dan universal. Karena dalam islam mengharuskan etika Islam itu sendiri antara kajian seperti itu tentang sejarah Al-Qur’an , Politik dalam Islam, dan lain-lainnya tidak di kaitkan dengan makna islam sebagai satu agama dan pandangan hidup yang memiliki prinsip dan tradisinya sendiri.⁷³

Upaya dari sebuah penutup dari paragrafi diatas ini bahwa yang perlu dicatat Islam adalah Agama dan pandangan hidup yang telah melahirkan peradaban yang gemilang.

Diantara lain peradaban Barat yang menjadi persoalan pada sub tema di atas ini, disampng hegemoni peradaban yang memiliki kekuatan tersendiri, tradisi keilmuan dikalangan umat muslim yang memiliki keterbatasan untuk berperang daya saing pemahaman dan keintelektualannya disaat ini. Tidak banyak pula bahwa dari para kebanyakan muslim tersebut yang berpikir jalan pintas, bahwa akan berjayanya Islam akan bisa di capai jika kekuasaan politik mereka pegang. Politik, Ekonomi, Informasi adakah sector-sektor penting dalam kehidupan manusia. Dan tradisi keilmuan itulah yang akan membangkitkan peradaban. Mongol bisa mengalahkan Islam di Bahgdad dan sekitarnya. Justru peradaban yang rendah itu menyeraplah ke suatu peradaban Islam.maka ketika berbicara tentang peradaban tidak bisa lepas dari perhatian kita semua yaitu Ilmu. Dan Ironisnya dalam kajian keislaman, tradisi keilmuwan ini tidak berkembang dengan baik. Hamper tidak ada perhatian yang lebih serius dikalangan kaum Muslim, khususnya melahirkan cendikiawan wacana Islam dan Barat.⁷⁴

⁷²Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal
h. xx

⁷³ Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal
h. xix

⁷⁴ Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal
h.xxi

Penelitian kali ini lahir karena adanya pacuan dari fenomena merusaknya “Hegemoni Barat” dalam bidang keilmuan keislaman. Pemikiran dan metodologi Barat dijiplak begitu saja tanpa daya kritis yang berarti. Dan dengan adanya perusakan paham pluralism agama, penggunaan metodologi hermeneutika untuk tafsir Al-Qur’an dan Hal-Hal dasar malah di bongkar dan didekonstruksikan tanpa memikirkan dampaknya yang serius.

Mungkin dakan pembahasan peradaban barat ini adanya yang terlalu kearah ha-hal yang negative dari peradaban barat. Akan tetapi latar belakang yang ingin ditunjukkan bahwa peradaban barat begitu gemerlap dan sangat menyilaukan mata. Adanya potensi yang menimbulkan ledakan besar daru pemahamannya karena memahami barat adalah problema tersendiri bagi kalangan umat muslim di dalam kalangan umatnya itu sendiri. Dan memang banyak disebabkan oleh invasi peradaban barat dalam peradaban dan pemikiran.⁷⁵

Sejarah bersumber dair peradaban barat ini di mulai dari pemahaman kebingungan dari paham liberalisme. Kisah panjang yang dilalui oleh peradaban manusia banyak sudah di rasakan dari penghadapannya sebagai tantangan dan kekacauan tetapi belum pernah di hadapkan dengan tantangan yang lebih besar dan serius dan dari padaditimbulkan oleh peradaban Barat. Memandang problem-problem terberat dalam penghadapannya kepada manusia adalah hegemoni dan pendominasian keilmuan sekuler barat yang menghancurkan kepada peradaban umat manusia. Menurut Barat bagi Al-Attas kebenaran adalah fundamental dari agama dipandang sebagai teoritis saja. Kebenaran absolut dinegasikan dan nilai-nilai relative diterima. Dan tidak ada satu kepastian konsekuensinya. Manusialah yang akhirnya dituhankan dan Tuhan pun di manusiakan dan berbagai probem kemanusiaan muncul sebagai hasil dari kacaunya nilai-nilai.

Nilai moral yang secara terus terganggu dengan adanya pemahaman dari Barat tersebut dan menjadikan kekacauan umat manusia dan picuan inilah menjadikan kontroversi hebat dari barat dan saat seperti ini adalah problem komoseksualitas Dunia Barat. Dunia Barat, bahkan di kalangan gereja Kristen kni diguncang hebat dalam persoalan pembatasan hakhak moral dalam diri individu yang berdampak bagi moral-moral dan batasannya soal moseksualitas.⁷⁶

Homoseksualitas yang dari sudah ada dari berabad-abad lamanya dicap sebagai praktik kotor dan menyesatkan dari persimpangan seksualitas hingga maksiat bagi kalangan agama-agama keseluruhan. Kemudian di deklarasikan oleh Barat dengan hak dan praktik yang manusiawi dan harus dihormati dnegan sebagai penghormatan kepada Hak Asasi Kemanusiaan. Perkembangan kasus

⁷⁵ Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal h.xxii

⁷⁶ Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal h. 4

homoseksualitas di Barat kini kian marak dan menarik untuk dijadikan pembahasan dan kajian. Pemimpin pemimpin Gereja semakin terdesak dengan opininya, karena sebagian pemuka agama Kristen lah telah menjadi dari bagian kaum tersebut entah dari Homoseksualitas atau lesbianism.⁷⁷ Dan di dalam pelaku Gereja dari homoseksualitas mereka berlomba-lomba membuat tafsiran untuk bisa mendukung dari perilaku Homoseksualitas atau Lesbianisme bisa disahkan secara Agama. tetapi pendukung dari kalangan teolog Kristen kepada kaum Homoseksualitas kemudian membuat tafsiran lain misalkan, adanya justifikasi terhadap moral dari praktik-praktik homoseksual, ujanya John J. McNeill Tuhan menghukum kaum Sodom dan Gomorah, bukan dari praktik Homoseksualnya akan tetapi dari ketidaksopanan penduduk kota lah terhadap tamu Lot.

Dari Kaum Katolik mencetuskan dan telah bergerak di dalam mendirikan kelompok Gay dan diberinya sebutan “Dignity” yang memiliki pandangan dan ajaran tentang praktik homoseksua; dan Lesbianisme tidak bertentangan dengan ajaran agama yang ia yakini yaitu Kristus.. Teolog lain Seperti, Gregory Baum, menyatakan “ bahwa kaum Homoseksual ini bisa menumbuhkan rasa cinta itu sendiri, maka cinta Homoseksual tidak bertentangan dengan naluri manusia.” Di tahun 1976⁷⁸

Logika kaum sekuler di Barat yang nggan berpegangan terhadap agamanya sendiri sebenarnya sederhana. Karena pertumbuhan kaum Homoseksual sudah menjadi kenyataan dan sudah dipraktikan di kehidupan kenyataan Barat, maka harus memberikan legitimasinya kepada kaum tersebut. Dan tidak jarang pula harus merekayasa ajaran agama agar sesuai dnegan tuntutan zaman dan agar Kristen bisa tetap relevan terhadap kaum-kaum Homoseksual. dan tidak ada pengecapan Kuno, dan dapat diterima oleh masyarakat modern, sebab mohoseks sudah dipersepsikan kepada para pendukung dan gaya hidup modern. Maka, ketika dunia membongkar kasus yang lebih parah yaitu kasus tokoh-tokoh agama Gereja lainnya dan seolah kemunafikan itu terbongkar, dimana tokoh-tokoh agama tidak kawin dan bahkan menikah dan punya hak penampungan dosa dan ternyata melakukan tindakan keji dan menzinai anak-anak. Dan dari data yang ada 1 dari 10 pastor setelah tahun 1970 akhirnya tertuduh telah melakukan pelecehan seksual itu. Sebanyak 10.667 anak-anak telah menjadi korban pelecehan seksual. ini dari tahun 1950 – 2002. dan dilakukan oleh 4.392 pastur sebagai respon terhadap tuduhan adanya penyembunyian kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan para tokoh Gereja.⁷⁹

⁷⁷ William F. Allen, *Sexuality Summary*, (Ohio, Alba House Communications, 1977) h. 12-15

⁷⁸ William F. Allen, *Sexuality Summary* h. 33-39

⁷⁹ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal* h. 6

Sejumlah media internasional menyebutkan bahwa kalangan konservatif dilingkungan Gereja, yang percaya bahwa praktik gay dan lesbian bertentangan dengan ajaran Kristen. Dan penentang seperti argument di atas yang diajukan oleh Robinson dicap sebagai “konservatif” dan yang mendukungnya di cap dengan label “liberal”. Dan yang menarik pada kasus kali ini, dalam menghadapi dengan pelabelan kecaman dari berbagai penjurur dunia pelantikan Robinson berjalan dengan aman dan tidak ada kendala sedikitpun. dan para pastur yang hadir dalam pelantikan Robinson di arena hoki University of New Hampshire, antri dan untuk membeirkan ucapan selamat kepada Robinson. CNN melaporkan ahnya sedikit yang keluar untuk mengadakan demonstrasi kepada Robinson dari pemikiran dan icap Liberal tersebut.

Robinson memang dikenal dengan homoseksual yang secara terang-terangan. Ia telah hidup bersama dengan pasangan homoseksualnya bernama Mark Andrew selama kurang ebih 14 tahun. Dan dari pengutusan tokoh penting di dalam Gereja bisa dikatakan sebagai satu puncak kesuksesan gerakan liberalisasi di dunia Kristen. Mereka berhasil mengibarkan satu ketentuan di dalam bible. Yang mengutuk perlakuan homoseksual. Dan dimana di dalam Bible telah di katakana dalam Imamat 20:13 “ Bila ada seseorang laki-laki yang tidur bersama laki-laki secara bersetubuh secara orang bersetubuh dengan wanita, maka keudanya melakukan perbuatan yang keji dan pastilah mereka di hokum matidan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.”⁸⁰

Namun seperti yang diketahui masyarakat Barat secara umum bahwa, arus sekularisme dan liberalisasi di dunia Barat begitu kuat dan berlangsung secara grafik pelonjakan yang bertahap kearah atas. di daam kasus Robinson adakan memebrikan dampak yang lebih hebat arus Liberalisasi Gereja ini sudah cukup lama menerjang. *Dignity* sebuah organisasi gay Katolik international pada tahun 1976, dan sudah memiliki cabang sebanyak 22 di penjurur AS dan termasuk Kanada dan berbagai Negara bagian Barat. *Dignity* memperjuangkan melalui majalah bulanan untuk mendapatkan pengakuan dari Gereja Katolik. Dalam piagam iman (The crarter of belief) yang mereka buat tertulis adalah sebagai berikut :

“Kaum Katolik gay adalah lembaga mistis Kristus dan termasuk diantara kaum Tuhan... Kami memiliki martabat sejati karena Tuhan menciptakan kami, Kristus mati untuk kami... karena itu semua, kami memiliki hak, hak istimewa, tugas, untuk menumbuhkan kehidupan suci.. kami percaya kaum gay dapat mengekspresikan kehidupan seksualnya dalam sebuah sikap yang sesuaidengan ajaran-ajaran Kristus.”⁸¹

Jadi, dasar logika yang mereka gunakan adalah “Hak dan kebebasan individu” dan “tidak merugikan orang lain.” Di Negara sekuler seperti

⁸⁰ Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal h. 8

⁸¹ William F. Allen, Sexuality Summary h. 50-51

Amerika Serikat yang konstitusinya melarang campur tangan Negara di dalam masalah agama, Amerika Serikat memang di dalam kondisi yang sulit karena pemahaman tidak bisa melarang perkawinan gay, dan di dalam bagian Negara yang berada di Amerika Serikat mengesahkan pernikahan sesama jenis dan jika melarang perkawinan gay dan lesbian adalah perbuatan menentang hukum dan bagian dari hukum federal. San Francisco disebut dengan “*Gay capital of America*” dan telah mengeluarkan ribuan lisensi (izin) terhadap perkawinan gay, dan ketika presiden George W. Bush mengumumkan akan ada usaha darinya dalam mengamandemankan konstitusi yang dapat melarang perkawinan Homoseksual. Dan hal ini menjadikan isu debat. Bush menyatakan bahwa dengan melarangnya perkawinan Homoseksual, ia telah melakukan itu untuk melindungi “lembaga yang paling memiliki peradaban fundamental (*The Most Fundamental institutions of civilization*) suara penentang dari perkawinan Homoseksual di Amerika Serikat menjadi pertentangan itu dan bertabrakan dengan logika sekuler yang telah mereka kembangkan sendiri, bahwa menurut kepercayaan AS memiliki sesungguhnya kebenaran moral ditentukan dari faktor mayoritas dikalangan ruanglingkup tersebut. Apalagi, dikalangan umat Kristen di Barat, telah muncul banyak argumentasi yang mendukung sahnya praktik Homoseksual dan bahkan sudah adakesepakatan di beberapa Negara bagian untuk mengesahkan diangktnya seorang homo sebagai uskup.⁸²

Logika kebebasan individu—asal tidak merugikan orang lain dan ini menjebak masyarakat Barat dan masyarakat sekuler lainnya untuk menerapkan hukum di atas pemikiran pada hak individu dan bebas. Seperti dalam buku kasus hukum zina, jika zina disahkan dan dihalalkan oleh masyarakat dan Negara, lalu apa logikanya Negara mau mengharamkan Homoseksual.?

Jadi, jika perzinahan yang merupakan perbuatan jahat telah di halalkan, adalah sangat sulit menemukan logika jika yang mengharamkan homoseksual dikarenakan ketika masyarakat sudah menganggap bahwa homoseksual adalah hak individu yang harus dihormati juga sebagaimana zina. Mereka menganggap bahwa perzinahan adalah hak individu yang harus dihormati ketika sudah dianggap hal yang biasa dan lumrah dan tidak boleh di pertentangkan dandicampuri oleh orang lain atau Negara lain. Dan ketika Negara yang menganggap perzinahan seperti itu bahkan jika kearah homoseksual tidak bisa mengambil hukum atas perbuatan criminal.

Maka bisadiduga, kasus homoseksual di Negara-negara Barat dan Negara secular lainnya menjadi persoalan yang pelik. Satu sisi, agama yang melarang hal demikian dan mengutuk tindakan maksiat. Namun pada sisi lain, Negara sudah terjebak pada pemikiran demokrasi sekuler. Yang menyerahkan urusan moral pada pendapat masyarakat. Dan Amerika Serikat pernah memiliki kasus yang pelik di dalam studi kasus pelanggaran meminum minuman keras. Mula-mula

⁸² Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal
h. 11

masyarakat Amerika Serikat menyetujui perundang-undangan “*The Prohibition Law Of Amerika*”⁸³. Minuman keras yang tadinya mereka menilai menimbulkan dampak negative terhadap akal dan mentak bahkan hingga ketenangan di masyarakat. Akan tetapi ketika hukum ini diberlakukan sungguh-sungguh, rakyat AS kini sudah hamper keseluruh meminum minuman keras dan menjadi kecanduan, kemudian memberontak dan menuntut pembatalan perundang-undangan tersebut. Rakyat yang dulu menerima kini kemudian berbalik menolaknya.⁸⁴

Kasus gay yang berada di Negara bagian Amerika Serikat dan Negara Sekuler yang dikatakan religious dan sebagian besar masyarakatnya masih mengaku kepada tuhan. Tetapi Negara Amerika Serikat melarang campur tangan agama dan Negara. Secara eksplisit dikatakan dalam Bill of Rights,⁸⁵ yang menjadi bagian dari bagian Konstitusi AS. Dan di dalam Kongrespun tidak bisa adanya pengeluaran hukum apapun yang menjadikan agama apapun sebagai agama di Amerika Serikat. Atau menyingkirkan kebebasan untuk beribadah yang dikehendaki seseorang.

Masyarakat Barat tidak terjebak di dalam berbagai titik ekstrim dan lingkaran setan, dalam masyarakat sekuler agama tidak ditolak sekalipun,⁸⁶ namun agama harus menyesuaikan kehendak manusia. Ajaran agama yang tidak cocok bagi manusia perlu dibuang. Mereka merangkak daam satu titik ekstrim ke titik ekstrim lainnya dalam kasus Homoseksual dulu mereka memperlakukan kaum Homoseks dengan sangat sangat kejam dan sadis.⁸⁷

Dan dari kasus-kasus ini pegiat feminis juga berusaha keras bagaimana agar gerakan mereka mendapatkan legitimasi dari Bible, mereka tidak menulis lagi God, tetapi Goddess. Sebab gambaran tuhan dalam stigma mereka adalah Tuhan maskulin. Mereka menginginkan tuhan yang berasal dari perempuan dan beberapa tokoh feminis myakinkan karena di dalam ajaran bible bukan kata-kata Tuhan, akan tetapi akan sekadar koleksi tentang sejarah dan mitologi yang ditulis oleh kaum laki-laki. Sebab itu, Perempuan tidak memiliki kewajiban

⁸³ John Henry Wigmore, Problems of the law's Mechanism in Amerika, (Vrginia Law Review Feb 1917), Vol. 4 No. 3 h.346-347

⁸⁴ John Henry Wigmore, Problems of the law's Mechanism in Amerika, h. 349

⁸⁵ Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal h. 14

⁸⁶ Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal h. 15

⁸⁷ George Barna, What Americans Believe, (California: Regal Books, 1991) h. 171-220. Majalah The Economist edisi 28 Februari- 5 Maret 2004 menyebutkan bahwa AS adalah “ The most religious countries in the industrialized world”. Lebih dari 80 persen masyarakat AS bahkan lebih mengaku percaya kepada Tuhan. Sementara hanya 62 persen danri rakyat Prancis dan 52 rakyat Swedia yang percaya keada Tuhan. Sekitar dua pertiga penduduk AS mengaku sebagai anggota Gereja, 30 persen pergi ke Gereja setiap minggu, dan 43 persen mengaku sebagai Kristen yang terlahir kembali (born-again Christians). Kelompok-kelompok agama juga semakin meningkatkan pengaruhnya terhadap kehidupan politik dan budaya AS.

moral dalam pengkultusan akan kitab bible dan berawal dari itu semua bahwa melahirkan sebuah ekstrim dari gerakan Feminisme pada gerakan pembebasan wanita yang kemudian dinamakan “gerakan kesetaraan gender (gender equality) dan ini menjadi trend global. Dan darisinitulah banyak kalangan Muslim yang kemudian mencoba mengotak-atik ajaran agama Islam⁸⁸ yang dinilai atau menindas wanita. membelenggu atau menindas wanita. Dan ujung-ujungnya adalah legitimasi Al-Qur’an dan mengatakan bahwa Al-Qur’an adalah Kitab yang bias Gender sebagaimana serupa dalam peristiwa Bible dan Kaum Kristen.

Jika ajaran agama sudah tidak bisa diyakini dalam kebenaran secara tetap maka yang akan di andalkan adalah pemikiran dan rasionalitas dari kinerja otak saja dan terseret dalam arus yang serba relative dan temporal tidak ada standar kebenaran dan kebenaran bergantung kepada kesepakatan.

Dari tingkat Global, cara pandang yang dimiliki oleh Negara sekuler dan liberal kemudian di globalisasikan sebagai bagian dari upaya pelestarian hegemoni. Ini adalah bentuk yang wajar dalam logika politis yang secara dominan. Demokratisasi liberal mengharuskan adanya sekularisasi dan sekaligus pluralism, yang tidak membedakan agama dan manusia atas dasar agama atau ras tertentu meupun manusia di gemborkan kedalam dasar bangsa dan Negara.⁸⁹

Di dalam era globalisasi, dimana proses liberalisasi berlangsung di berbagai macam sector bidang, adanya yang meresponnya dengan pro ataupun kontra tentang terkait batas-batas normal mengenai moralitas yang akan berlangsung di dalam era saat ini dan akan selalu terjadi dan kemungkinan akan selalu ada. Kaum sekuler liberal dengan mudahnya berfikir bahwa “kebebasan berekspresi” adalah standar moral yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat” jadi kata mereka tidak boleh ada yang mengambil dari satu pihak manapun dan memonopoli kewenangan dalam melakukan penghukuman dan pemberangusan atas nama apapun, baik alasan politik, moral, agama, dan adat.

Logika kaum liberal ini berasal dari prinsip “humanisme secular” yang menempatkan manusia sebagai Tuhan. Manusia lah yang menjadi dan menentukan segala hal. Dalam kebebasan individunya asal tidak merugikan orang lain. mereka tidak mau ada campuran agama di atas moral. Mereka ingi mengatur diri mereka sendiri. Menurut mereka, tuhan tidak berhak campur tangan dalam urusan kehidupan, karena manusia lebih hebat dari manusia.⁹⁰

⁸⁸ Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal
h. 16

⁸⁹ Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal
h. 17

⁹⁰ Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Liberal
h. 24

B.) Perkembangan Sejarah Demokrasi Barat

Adanya diskursus mengenai desentralisasi dan demokrasi dalam perkembangannya hingga sampai masuk keindonesiaan, telah mendapatkan kajian-kajian dan perdebatan panjang diantara pemikir dan peneliti yang dibagi menjadi dua kubu pemikiran atau perspektif.⁹¹ Sebelum jauh dari pada itu adanya teori *system* politik dan pendekatan yang sangat bermanfaat dan dapat difahami bila dilihat dari berbagai peristiwa dan fenomena politik sampai derajat tertentu. Adanya yang diperlukan beberapa disiplin yang tepat setepat-tepatnya adalah penerapan model-model di permasalahan politik.⁹²

Dimana sebelum adanya demokrasi yang muncul, ideology agama yang hanya menjadi tradisi, melakukan kesangsian mendalam bagi orang Eropa. Berbeda halnya ketika terjadi Perang Saudara di Inggris, Konstitusi Kepulauan Rhode 1641, dan pada masa seputar perumusan Konstitusi Amerika 1788. Tetapi yang paling memberikan sumbangan terhadap konsep demokrasi adalah Revolusi Prancis 1789.⁹³ Sejak saat itulah istilah demokrasi seolah-olah menjadi nama baru bagi aliran *Republikanisme* yang merupakan kritik terhadap *system* dominasi lembaga monarki di Eropa.

Demokrasi merupakan suatu “produk” karena penggunaan nama tersebut diasumsikan sebagai “sumber kekuasaan” dibandingkan dengan “suatu cara memerintah” dan kemudian di era abad ke-19 ini ide demokrasi apa yang di menjadi keinginan Negara Barat yaitu demokrasi liberal meliputi *system* parlemen, hak-hak sipil dan politik lainnya.⁹⁴ Dari semua itu merupakan kombinasi evolusi moral manusia. Politik masa itu hanya untuk kaum pria dewasa dan sedikit yang menjangkau wanita, selanjutnya merangkul kelompok kaum-kaum anak muda yang berusia 18-tahun dan seterusnya dinikmati pula oleh semua kalangan rakyat.

Jika di kondisi tertentu yaitu masyarakat dijadikan sebagai salah satu pandang bahwa dialah sebagai factor penentu dalam perkembangan dan kemerosotan teori politik, alternatifnya ada di bagian internal itu sendiri yaitu

⁹¹ Muhammad Aqil Irfham, I Demokrasi Muka Dua : Membaca Ulang Pilkada di Indonesia (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia 2016) Hal 29

⁹² N. Mitchell dan William C. Mitchell, Politics and the Social Sciences : An Introduction to Political Science, Rand McNally & Co 1969

⁹³ Terjadi dengan penyerangan ke penjara Bastille 1789 sebagai simbol absutisme raja-raja Prancis, dan revolusi tersebut mengumandangkan slogan *liberté, égalité, fraternité*. Revolusi tersebut berdampak abadi terhadap sejarah Perancis, dan lebih luas lagi, terhadap Eropa secara keseluruhan, di mana Monarki absolut yang telah memerintah Perancis selama berabad-abad runtuh dalam waktu tiga tahun. Rakyat Perancis mengalami transformasi sosial politik yang epik; feodalisme, dan monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok politik radikal baru.

⁹⁴ Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man, Publication. (Penguin, 1992). Lihat pula Barry Holden, Democracy, dalam William Outhwaite (Ed), Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern, alih bahasa Tri Wibowo (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 198.

jalan satu-satunya. Semua pemikir seperti Plato, Aristoteles, Burke, Montesque, Locke- menulis adanya tujuan praktis dengan sisilain yang dimaksudkan untuk mempengaruhi tingkah laku politik yang sebenarnya. Mereka menulis untuk mengutuk atau mendukung lembaga dan *system* politik yang ada atau meyakinkan khalayak untuk mengubahnya karena pada dasarnya merekalah yang terlibat dan dengan merekalah sasaran utama dari masyarakat politik.⁹⁵

Perkembangan demokrasi ini bisa dimulai dari Pengarahan ilmu politik apa yang di ungkapkan oleh salah satu ahli yaitu Easton, sudah terlalu lama bahwasanya ilmu politik di dominasi oleh hyperfaktulisme. Terlebih dimana pada umumnya Bryce yang di permasalahan telah menjadi kan tekanan yang berlebih terkait Hyperfaktualisme. Tapi, para peneliti dan ilmuwan bahwa apa yang dikatakan di atas adanya Bryce demi kebaikan di dalam pekerjaannya yang terdahulu, Kasus yang kali ini ambil, *American Commonwealth*, ia tidak mengabaikan teori, ia hanya tidak suka pada pembuatan dan pembentukan *system* yang di sebutnya dengan *ideologomachies* dan terdapat pada filsafat sejarah dan analisa hukum Jerman.⁹⁶

Salah satu tokoh seperti Cobban juga berpendapat bahwa teori politik adanya kemerosotan dan ia sangat pesimis dengan teori politik akan hidup kembali.⁹⁷ Adanya sintesa dalam tradisi intelektualisasi di Barat selama lebih dari 2500 tahun, yang satu mengubah yang lainnya. Dan menurut Cobban bahwa sejak abad ke-18 kita selalu beranggapan bahwa pemikir politik yang besar tidak bisa seketika langsung muncul dan berada di posisi puncak dengan begitu saja.

Cobban mengakui bahwa baik di Negara yang berpemahaman komunis maupun di Negara Barat, Angkatan senajta tidaklah diatas sipil. Di dalam dunia komunis, bentuk dari organisasi partainyaadanya Oligarki kecil, muncul dari suatu *super bureaucrat* ata ketua partai mengambil keputusan dan penguasaan prinsip, dan kalau tidak begitu semua maka hal itu tidak punya nilai ilmiah.⁹⁸ Setelah melanjutkan dan mencoba merumuskan kembali teori agar bisa mendapatkan sebuah orientasi empiris, maka teori menjadi tergantung pada pengumpulan fakta dan ada saatya teori hampir tak nampak.

Kebiasaan seperti ini yang masih berlanjut dan mempengaruhi ilmu politik hingga tahun dua puluhan, ketika kecenderungan umum ada di pihak ilmwan politik yang mencari masalah-masalah urgen dan dapat dijadikan sebuah kajian atau bahan riset tanpa ada usaha untuk mengetahui bahwasanya sebuah gejala politik ini sebaiknya dapat dimengerti. Oleh karena itu, pemegang kekuasaan seperti kasus di paragraph atas dan dalam pembentukan mekanisme penindasan (resepsi) untuk digunakan terhadap mereka yang tak sejalan, sedang

⁹⁵ Alferd Cobban, "Ethics and Decline of Political Theory" dalam *Political Science Quarterly*, LXVIII, 3 September 1953 Hal 289-303

⁹⁶ SP. Varma, *Teori Politik Modern*(Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2010) Hal 111

⁹⁷ Alfred Cobban dalam Gould dan Thusvy, ed., *op.cit*, hal. 289-303

⁹⁸ SP. Varma, *Teori Politik Modern*(Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2010) Hal 112

mesin partai tersebut tidak kurang kuasa dibandingkan mesin militer. Kita mungkin hendak menyyengkal adanya keadaan itu dalam dunia Demokrasi.

Meskipun gagasan politik cenderung kearah bagian Negara Barat dan didominasi gagasan politik Demokrasi. Dan konsep demorkasi muncul di abad ke-18, tetapi pada abad ke-19 tidak ada usaha untuk membentuk dan merangkai kembali susunan demokrasi sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang telah berangsur-angsur mengalami perbedaan. Pada awal mula ke-19 adalah awal dari faham Nasionalisme, Komunisme dan fasisme. Dan demokrasi merupakan formula tanpa makna. (Uang Logam). Dari kesemua itu gagasan politik perlunya pembentukan kembali yang sudah awal mula diformulakan dan disusun rancangannya secara periodic jika hendak tetap mempunyai nilai.⁹⁹ Tetapi dalam memandang di beberapa decade ini ada sejumlah penulis yang mempunyai pendapat cukup berbobot tentang politik masa kini, seperti Ferrero, Bertrand, Reinhold dll. Mereka memandang dalam konteks Negara yang berkaitan dengan *system* pemerintahan itu dari segi *power* dan tidak memasukkan etika kedalam lapangan politik. Karena adanya perubahan peradaban itu di karenakan setiap atom yang membentuk masyarakat dikumpulkan dan di lemparkan dan dihancurkan oleh *power* tersebut yang tidak diciptakan dan di kontrolnya.¹⁰⁰ Jadi tidaklah mengherankan jika *system* politik mengaami kemerosotan dan dengana danya konsep pengertian seperti ini dapat dikatakan bahwa hancurnya suatu peradaban mungkin berarti lahirnya suatu agama, akan tetapi hal ini tidak menjadi kepuasan tersendiri dari ilmuwan politik bahwa beranggapan kemerosotan peradaban di dasarkan agama.

Dan di dalam karya Azyumardi Azra di dalam buku yang berjudul Transformasi Politik Islam menyoroti era modern atau masa yang sedang terjadinya krisis kemunduran di era modern khususnya dalam peradaban Islam. Dan adanya benturan benturan degan Negara bagian Barat hingga menyebabkan dunia islam terjatuh dalam jurang imprealisme dan kolonialisme.

Dan di dalam perkembangan modernitas ada *history* dalam bagian sub judul perkembangan demokrasi, hingga akhir abad ke-18 sebagian besar *system* politik utama tidak berdasarkan prinsip demokrasi hak Ilahiah para raja adalah isu yang maat ramai diperdebatkan dalam kancah politik eropa sepanjang zaman modern awak dan zaman pencerahan. Dalam sejarah filosofi yang amat jauh lebih luas dari perspektif dan pemikiran politik barat lebih dari 2500 tahun hamper tidak satupun yang menganggap demokrasi adalah cara terbaik untuk membangun kehidupan politik, dan adanya segala bentuk perlawanan terhadapkonstitusi demokrasi, kekacauan politik dan kekosongan moral dalam karakter demokrasi.

Amerika sebagai symbol demokrasi didunia bahkan dia telah mengingkari yang telah dicetuskannya yaitu *system* pemerintahan demokrasi, jika gabungan kata yang berdasarkan secara bahasa *demos* dan *krotos* diartikan

⁹⁹ Ibid Hal. 294

¹⁰⁰ Ibid Hal.295

sebagai pemerintahan yang demokratis diindikasikan dengan adanya dukungan dari elemen mayoritas masyarakat terhadap pemerintahan terpilih. Amerika Serikat bukan Negara yang demokratis, walaupun mereka menggambarkan dirinya sebagai Negara yang tidak demokratis. Sistem pemerintahan yang terjadi adalah sebuah *system* yang totaliter dan sama sekali tidak menghargai undang-undang dasarnya.

Dan dari fenomena demokrasi yang tampak dalam pemilihan presiden di Negara bagian Barat contohnya AS di tahun 2000 dan dimana dari penjelasan demokrasi yang diatas telah di paparkan bahwa dalam Negara yang memakai demokrasi sebagai *system* nya diindikasikan dengan dukungan mayoritas rakyat terhadap pemerintah terpilih, namun justru terjadi pada kasus pemilihan presiden AS tahun 2000 MA (Mahkamah Agung) AS memenangkan George W. dalam kasus ini memunculkan perdebatan sengit dan adanya realita yang sangat ironis tentang demokrasi: ‘Pengkhiatanan Amerika’.¹⁰¹

Demokrasi selalu mengalami perubahan dimulai perkembangan di Yunani hingga saat ini, jika dilihat dari segi formal dan substansinya karena demokrasi harus menyesuaikan dengan konteks dan sosio-historisnya. Berkembangnya demokrasi bisa secara evolutif, yaitu secara perlahan tapi pasti. Dan tidak selalu melulukan awal kehadiran demokrasi berada yaitu Yunani Kuno untuk melihat bagaimana implementasinya di era pasca lahirnya demokrasi.¹⁰²

Dan secara konsep Demokrasi barat dengan pengertian global yang akan menjadi indicator, dan melalui beberapa definisi demokrasi ini yang sering sekali disamakan dengan beberapa unsur di dalam kebiasaan tradisi politik Eropa dan AS dan dari segi kuantitas ilmuwan sosial, pengalaman yang dimiliki oleh Barat memberikan dampak kedalam pola pemikiran dan landasan dari beberapa definisi demokrasi tersebut. Dan di dalam konteks tersebutlah ada seorang tokoh ilmuwan yang mengemukakan pendapat tentang “ Bagaimana apayang dialami oleh Barat, apakah yang menjadi kata kunci Barat atau Pengalaman? Dengan kata kunc itulah bahwa masih ada jalan lain dalam menuju demokrasi yang diluar dari skenario Barat, jawaban inilah yang bisa menjadi pembahasan mendetail dan mendalam untuk demokrasi du dunia ketiga dan bisa dilakukan eksplorasi untuk mengeksplore demokrasi¹⁰³

Dalam dunia dewasa ini yang menjadi suatu konsep demokrasi yang bisa dikategorikan sebagai suatu konsep yang baik dan selalu di agung-agungkan dikarenakan sebuah *system* politik yang ideal dan ideology yang memiliki isyarat dari sebuah arti kekuasaan di dalam suatu politik atau pemerintah yang sedang dijalankannya dimulai Oleh, dari, untuk Rakyat.

¹⁰¹ Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, Jakarta : Gema Insani, 2005 hal 88

¹⁰² Shofwan Rozi dan Heriwanto, Demokrasi Barat: Problem dan Implementasi di Dunia, (Jurnal Al-Aqidah, Volume 11, Edisi 2, Desember 2019) hlm, 3

¹⁰³ Toha Andika, Syura dan demokrasi Barat: Kritik dan solusi menuju demokrasi islam, (Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam AL-IMARAH Vol. 2, No. 2, 2017 Hal 104

Sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh ilmuwan dan akademisi bernama MacGregor Burns¹⁰⁴

Dan ketika suatu internal perkembangan yang terjadi, maka demokrasi akan melakukan sebuah pergerakan yang dapat dimetaforakan sebagai cangkupan wilayah yang sangat subur untuk melakukan sebuah perkembangan yang berada di politik pemerintahan. Bahkan sudah tidak ada keraguan apabila di dalam lini perkembangan tersebut menitikkan kearah yang berada dipemerintahan demokrasi dna dalam bentuknya pun seringkali berubah dengan adanya perbaikan ini itu di dalam pendemokrasian sistemnya tersebut.¹⁰⁵ Adapun debat tebal dan debat ilmiah terkait hal-hal di dalam lingkup kajian demokrasi, tidak sering juga di temukan adanya wujud berupa dari kebebasan dan HAM. Bahwasanya Histori demokrasi bukan lagi tidak sejalan bahkan identik terkait sejarah yang berasal dari Hak-hak asasi manusia.¹⁰⁶

Dan bahkan demokrasi itu sendiri bisa menjadi nilai yang kurang positif dan mendapatkan citra buruk itu merupakan sistem pemerintahan yang ddilakukan orang banyak, dimana cenderung satu sama lainnya memiliki aturan tersendiri dan banyak perbedaan diantara kecenderungan riwayat hidup dan pengalaman bahkan kepentingan memiliki pertentangan satu sama lain itu sendiri, dilihat dari social eknomi dan perbedaan tingkat pendidikan juga menjadikan sebagai perbedaan yang mencolok.

Dengan adanya pemerintahan yang dilakukan oleh kaum mayoritas penduduk itu akan mudah berubah menjadi pemerintahan yang bersifat anarkis, menjadi ajang sebuah pertempuran satu konflik dengan konflik lainnya dan menuju kepentingan sebagai berbagai kelompok social dan pertarungan elite kekuasaan. Dan itulah yang menjadi kendala bagi terwujudnya pemerintahan yang baik. Consensus sulit dicapai dan konflik mudah terjadi.

Jika kita lihat di dalam sejarah tradisi yang diawali dari nilai-nilai Barat, maka demokrasi ini masih sangat bisa di perdebatkan karena berupa untuk menisbatkan demokrasi yang berasal dari Barat, jika dilihat dari nilai-nilainya. Maka seperti yang diketahui pada umumnya Sistem pemilihan umum yang bersifat multipartai dan parlemen yang berada seperti di Negara Inggris dan Prancis maka hal itu bisa saja diperdebatkan dan tidak bisa diterima secara Universal seperti halnya model tunggal demokrasi. Dan jika melihita kebelakang maka dimulai dari Revolusi Prancis yang dialami oleh Kaum Babouvis yang memulai dari pengembangan *role* model demokrasi yang kita kenal sebagai ‘antiparlemen plebisitari’ bahwa yang sangat penting idalam *role* model ini berupa untuk mempengaruhi sistem politik yang berada di Eropa di dalam jangka waktu cukup lama. Bahkan sebagai sistem alternatif utama yang berada

¹⁰⁴ MacGregor, Burns, *Government by the People* (Prentice Hall, 2003), hal. 3

¹⁰⁵ Holden, Barry. (2008). *Democracy dalam William Outhwait*, Ensiklopedi pemikiran Sosial Modern, Penerjemah Tri Wibowo, B.S, Jakarta: Prenada Media Group. Hal 198

¹⁰⁶ Teuku May Rudy, *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hikmah, 1999), hlm. 364.

di Barat yang ditawarkan oleh pemahaman dari ideologi Marxisme, bahwa Marx percaya model pemerintahan yang mengagungkan demokrasi sebagai sistem keadilan bagi keseluruhan pada dasarnya tidak akan bisa berjalan di dalam Negara Kapitalis. Negara pasca kapitalis memiliki perbedaan dengan rezim parlementer, bahkan parlementer memiliki ciri penghalang antara rakyat yang sebagai orang yang diperintah dan wakil-wakil yang memerintah.¹⁰⁷

Bilama diakhiri dari praktek alternatif-alternatif yang bersumber pemahaman Marxisme, dan jika diambil dari berbagai bentuk bahwasanya kebanyakan dari apa yang mewakili secara prinsip dari satu model demokrasi Barat sangatlah berbeda dengan apa yang dialami oleh penentu kebijakan Amerika Serikat di dalam model sartori. Dan dari keterbatasan-keterbatasan *role* model dari demokrasi yang disaat dijalkannya. Seperti halnya yang seharusnya menjadi pertimbangan bahwa dari peran Money Politik dan peran uang ini ada pergerakan kurva yang sangat tinggi dan signifikan di dalam menentukan siapa yang akan terpilih untuk membawa dirinya menjadi wakil-wakil rakyat tersebut walaupun dijalankan di dalam *role* model demokrasi yang ideal. Bahkan sangkin pentingnya uang di dalam penentuan wakil-wakil masuk kedalam sebuah tradisi dan budaya politik Amerika hingga menjadi sebuah fakta bahwa hal itu yang lebih berpengaruh kedalam menentukan daripada individu-individu yang memiliki kredibilitas dalam memilih pejabat negara. Atau hal lainnya juga yang menjadi sebuah pertimbangan, betapa banyaknya negara demokrasi di Barat yang telah memiliki kegagalan di dalam pencegahan rasisme antara ras kulit hitam dan non semit.

Jean Bodin merupakan tokoh filsuf yang dimana dia terkenal dengan masalah kemasyarakatan dan kenegaraan. Jean Bodin berpendapat bahwa agar diciptakannya suasana yang damai dan saling menerima kemajemukan beragama dan adanya hak kebebasan di dalam setiap golongan protestan dalam rangka menjalankan ajaran agamanya tersendiri sesuai dengan apa yang ia yakini dan halitu merupakan dari penghegemonian dari kaum gereja yang berasal dari Perancis yang amat memiki kekuatan dan bisa menimbulkan sebuah perpecahan dan aksi yang tidka diinginkan seperti peperangan di antara kaum Heguenot yang berlarut-larut dan menimbulkan banyak korban.¹⁰⁸ Jean Bodin bisa menaklukan dalam menyelamatkan Prancis keluar dari kekacauan sebab dari sengketa agama-agama yang menjadi cikal bakal terbentuknya konsep negara dan kebangsaan adapun dengan kekuasaan dan kedaulatan itulah yang berpusat kepada raja.¹⁰⁹

Adanya beberapa hal yang sedari Buya Hamka persoalkan tentang Demokrasi Barat, dia telah memberikan kritik dan anggapan bahwa Negara barat telah memiliki kegagalan yang sangat nyata dan bisa ditampilkan di dalam

¹⁰⁷ David Held, *Models of Democracy*, (Stanford, Calif: Stanford University Press, 1987), h. 113, 130.

¹⁰⁸ Fuad Hasan, *Pengantar Filsafat...*, hlm.51.

¹⁰⁹ Aidul Fitriaciada Azhari, *Menemukan Demokrasi*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hlm.11.

demokrasinya bahwa dengan adanya kedaulatan rakyat dari segala aspek kehidupan. Bahkan negara barat yang menerapkan demokrasi itu kaum pemodal dan buruh mempunyai kedaulatan, sedangkan di bidang kedaulatan rakyat dia hanya mempersoalkan dari hal itu sebagai di bagian bidang politik saja. Demokrasi barat ini telah dilahirkan oleh paham liberalism. Walaupun, semangat individu yang telah di tanam dan di tancapkan dalam demokrasi atau kedaulatan rakyat itu dibadalm bidang politik.

Dengan adanya individualisme ini telah memunculkan kapitalisme dibidang ekonomi, seharusnya dalam apa yang di sampaikan oleh Buya Hamka dalam gagasannyagagasan yang berhubungan dengan politik harus memiliki suara dari elemen rakyat, agar rakyat bisa mengtaur situasi ada yang diresahkan secara khalayak pada umumnya untuk hak demokrasinya tersebut. Dan para wakil rakyat serta rakyat pun harus memiliki peranan yang sama dengan hak di dalam *system* demokrasi agar menghalangi dominasi kapitalis dan feodal.

Dan dengan adanya hal-hal atau beberapa adanya yang *pertama*, bisa dilihat dari adanya cara yaitu berserikut dan selanjutnya berorganisasi. Didirikan sebuah organisasi ini sangatlah diperlukan agar menjamin dari titik awal atau kultur dan kekuatan pengembang bagikaum kaum yang bergolongan pemodal, dan bisa terhindari dari kedalam kelompok bersenjata dan kelompok yang bisa melakukan sebuah manufaktur dan mendominasi masyarakat politik. Hal terkait yang di atas telah mengalami penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Jika hal tersebut diterjadi jikalau hal itu terjadi sungguh-sunggu, dan ada beberapa yang bisa dilakukan dengan cara berorganisasi. Dan yang *kedua* hal ini merupakan dari nilai kebebasan dalam pengutarakan gagasan dan pendapatnya di dalam tulisan atau dengan lisan, jika hal tersebut dilakukan akan bisa menjadi solusi dan jika tidak dicegah dengan indoktrinasi akan bisa semakin menjadijadi. Dan yang *Ketiga*, adanya tradisi sebagaimana hak sanggahan secara dilakukan secara massal dan sudah banyak yang mengenal dari kalangan masyarakat desa di pulau jawa dan sudah lama dikenalnya, dengan adanya yang harus dilakukan tanpa melakukan sebuah kekerasan dan intimidasi untuk masyarakat yang berada di lingkup kebawah, *bottom-up*, dengan sebuah cara pengolahan aksesibility rakyat kalangan bawah di dalam pengelolaan SDA, seperti hutan dan kegiatan alam lainnya agar bisa membuat aksesibility nya berupa modal dan bisa mengadakan kredit perbankan.

Untuk adanya sebuah progres perwujudan dari ketiga pokok yang sudah di uraikan di atas, maka seharusnya pula demokrasi sebagai jalan sistem politik yang akan tumbuh berimbang dengan apa yang di terapkan oleh demokrasi ekonomi untuk bertujuan di dalam demokrasi yang memiliki karakteristik kerakyatan. Memiliki dalam realisasi dukungan dari kebijakan pembangunan dan akan memberikan dampak dari pengutamaan, afirmasi kepada mereka mereka yang memiliki perekonomian lemah dan miskin, dengan hal seperti

itulah yang dihadapi di medan kerja bagi rakyat memiliki efektifitas dari nilai-nilai keadilan dan memiliki keseimbangan¹¹⁰

Adanya salah satu tokoh yaitu Lewis dengan secara singkat yang menjelaskan di dalam karyanya yaitu Islam, Liberalisme dan Demokrasi bahwa dengan apa yang di tulisnya bahwa “Demokrasi merupakan sebuah kebijakan oleh suatu pemerintahan yang bisa saja dan dapat diubah dengan adanya kesepakatan mayoritas orang banyak yang disebut pemilu dan bukan diubah dengan pemerintahan itu sendiri.” Dengan adanya teori seperti ini hal yang diungkapkan oleh Lewis maka memiliki pemikiran bagaimana orang-orang barat ini memiliki upaya di dalam adanya penghubungan definisi tersebut kepada nilai-nilai demokrasinya sendiri. Ada hal-hal terkait dan sangat sulit untuk bisa diterima secara umum dan sekaligus adanya sebuah anggapan dan mempertanyakan nilai-nilai dari sebuah demokrasi itu sendiri dan demokrasi barat sebagai yang dimana bukan demokrasi yang diakui secara mayoritas ilmuwan politik termasuk Buya Hamka, bisa karena diposisikan sebagai suatu sikap anti demokrasi. Meskipun demikian, wajib adanya pematenan, bahwasanya dan setidaknya dari kuantitas setengah populasi di dunia ini tidak melakukan dan mewarisi demokrasi yang di tentang dan di dukung Barat .¹¹¹

Itulah cara demokrasi mati, adanya kediktatoran yang mencolok dalam bentuk fasisme, kudeta dan perebutan kekuasaan dengan kekerasan walaupun sudah jarang terjadi. Bahkan sebagian besar Negara mengadakan pemilu secara teratur, demokrasi masih bertumbuhan dan jalan menuju kerusakan lewat pemilihan umum secara mekanis yang benar-benar bisa mengecoh dengan apa yang sudah banyak dilakukan yaitu kudeta klasik, seperti apa yang sudah dilakukan Pinochet di Chile. Istana presiden terbakar, Presiden terbunuh atau terusir. Sebuah lembaga dan sebuah konstitusi yang memiliki ciri khas demokrasi sudah tidak ada . ketika Rakyat secara terus menerus memberikan suara. Autoraktorat itu merupakan dari apa yang telah menjadi hasil dari pemilihan umum untuk mempertahankan dari tampilan demokrasi serta adanya menghilangkan substansi tertentu.¹¹²

Dari haknya demokrasi ini memiliki peran dari *system* kebebasan dan memilih.¹¹³ Itu merupakan bentuk atau mekanisme *system* pemerintahan suatu Negara.¹¹⁴ Dari berbagai sistem, sistem demokrasi ini yang akan mewujudkan dari harapan harapan untuk sebuah keputusan yang dimana sudah disepakati dan

¹¹⁰ Salman Alfarizi, Mohammad Hatta Biografi Singkat. Jogjakarta : Garansi, 2010, hlm. 107-108

¹¹¹ Bernard Lewis, et. al., Islam, Liberalisme, Demokrasi, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 32

¹¹² Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, Bagaimana Demokrasi Mati, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama: 2019) hal. hal xi

¹¹³ Ajat Sudrajat, Pemikiran Hatta Tentang Demokrasi Kerakyatan, Skripsi UNY, hlm, 1

¹¹⁴ Muhammad Rizza Sihbudi, “Islam, Radikalisme dan Demokrasi” (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2004), hlm.5.

dipengaruhi oleh suatu perkumpulan dan dari keseluruhan itu dihasilkan oleh semua anggota dan dari setiap perwakilan memiliki haknya tersendiri dalam sebuah pengambilan dan keputusan. Dari permaknaan lainnya bahwasanya demokrasi ini memiliki prinsip yang sama persis dari sebuah pengendalian dari rakyat atas terjadinya dari pembuatan dan hasil keputusan dari perlakuannya secara kolektif dari kesemua itu memiliki persamaan atas hak di dalam upaya pengendalian hal tersebut kepada sebuah proses terjadinya.¹¹⁵ Dan dari perdefinisi yang lain pula bahwasanya demokrasi ini merupakan arti dari partisipasi masyarakat¹¹⁶

Para kebanyakan dan mayoritas dari intelektual Barat mengakui bahwa ia telah menyadari dari adanya hasil dari demokrasi barat yang ia fikirkan adanya keterbatasan-keterbatasan model dalam segi *system* dan dibandingkan dengan apa yang sudah dijalankan dari sebagaimana contoh yang seharusnya di pertimbangkan yaitu dari peran uang, secara terus menerus ada kurva yang sangat meningkat dan bertambah atas lonjakannya memiliki tingkatan yang sangat signifikan untuk menentukan calon pejabat di Negara AS dan sebagaimana yang telah tercantum bahwasanya AS sering mengagungkan demokrasi sebagai sistem politik yang ideal. Pentingnya uang di dalam budaya AS sampai pada kenyataannya bisa lebih sangat berpengaruh dari pada kualitas individu-individu dalam memilih pejabat negara. Dan yang perlu juga dipertimbangkan dari adanya fakta ironisnya negara-negara demokrasi di bagian Barat banyak yang telah gagal di dalam toleransi antara orang hitam dan non semit. Bahwasanya Anti semit ini memiliki reak yang berasal dari produk-produk barat dan tidak bisa didapati didunia Islam..

C.) Pandangan Tokoh Terhadap Demokrasi

Pengertian tentang demokrasi dan sejarah demokrasi memiliki diskursus nya tersendiri dari masing-masing Negara terkait apa yang diperdebatkan sejak era klasik hingga sampai sekarang ini. Demokrasi ini merupakan *system* pemerintahan yang mengatur tentang tatacara serta kaidah kaidah tertentu yang berbeda di dalam *system* pemerintahan lainnya. Demokrasi dianggap sebagai *system* pemerintahan yang sangat bisa diandalkan oleh kaum-kaum percentus. Sebagaimana demokrasi berlangsung di mayoritas Negara maka yang akan peneliti jabarkan terkait pembahasan dan penjabaran tentang demokrasi dimulai dari demokrasi secara umum, barat dan keindonesiaan.

Banyak antara tokoh yang memberikan pengertian demokrasi secara garis umum.

“A system of government in which those who have authority to make decisions (that have the force of law) acquire and retain this authority either

¹¹⁵ David Beetham dan Kevin Boyle, Demokrasi: 80 Tanya Jawab, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm.19-20.

¹¹⁶ Bernard Lewis, Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun sinergi warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm.3.

directly or indirectly as the result of winning free elections in which the great majority of adult citizens are allowed to participate.”

Dan hal yang sama juga dilakukan oleh penulis lainnya yaitu Henry B Mayo.¹¹⁷ Dia memiliki pendefinisian demokrasi yang berbunyi :

“A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.”

Halnya juga seperti Menurut Ibnu Rusyd mengemukakan pendapat bahwa Demokrasi :A Ibnu Rusyd secara sadar bahwasanya pada demokrasi sebuah bentuk negara yang bisa di adopsi karena cocok dan ada nilai menjamin bagi umat muslim. hal ini bisa untuk diterapkan oleh umat islam, terlebih dari pada itu di dalam faktanya bahwa dunia islam masih kesulitan untuk menemukan dan tidak bakal ada yang sesempurna sebagaimana figure yang dimiliki atas kesempurnaan atau keutamaan sebagaimana Rasulullah, di dalam sebuah sistem yang Rasulullah jalankan pada masa kehidupannya serta hal inipun di pertegas oleh Erich From memberikan sebuah pendapatnya bahwa di dalam prinsip khususnya demokrasi memiliki gagasan dimana tidak ada seorang yang memiliki kepemimpinan di sistem demokrasi ini sebagai penguasa titik tertinggi sebagaimana elit politik manapun, karenanya mereka di pilih atas dasar suara rakyat dan rakyatlah yang menentukan nasib mereka untuk menjadi perwakilan atas masyarakat banyak, berkaitan dengan masalah umum.¹¹⁸ Dan menurut tokoh yang akan di teliti yaitu Buya Hamka mengenai tentang demokrasi bahwasanya “Buya Hamka yang menyatakan bahwa dari suatu umat itu merupakan bagian dari keseluruhan umat yang sudah membentuk atas suatu masyarakat atau suatu kelompok, hal itu yang menjadi dasar dari sebuah kepercayaan keyakinan. Meskipun dari suatu tegakna yang telah berdiri dari suatu negara ataupun kekuasaan harus dimulai sejak manusia itu sendiri mengetahui tentang musyawarah dan bernegara, sadari hal ini merupakan kekuasaan dari berbagai bentuk aspek yang dimiliki oleh Allah, dan menjadikan Khalifah yaitu manusia sebagai pemimpin untuk menjalankan kekuasaan yang dimilikinya tersebut dan dilakukan harus dengan dibarengi kepada aturan aturan yang sudah ditentukan di dalam kehendak aturan Allah di Nash”¹¹⁹

Dari 4 rumusan diatas sudah menjadikan ayas pemahaman untuk menyempurnakan dari makna demokrasi tersebut: yaitu (1) Demokrasi merupakan suatu *system* pemerintahan dan memiliki atas tingkatan elemen yang memiliki keterkaitan dan tidak bisa dengan sengaja ataupun tidak sengaja di lepaskan atas keterhubungannya (2) demokrasi memiliki anekaragam nilai-nilai

¹¹⁷ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (1960), hal. 70

¹¹⁸ Fauzan “ Pemikiran Politik Ibnu Rusyd”, dalam *Kalam Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* hal. 364

¹¹⁹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa Yang Memungkinkan* dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (eds.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta, 1996, Mizan, hal. 100.

tergantung dari sudut pandang mana peneliti akan ungkapkan. (3) kewajiban-perwakilan ini yang memiliki peran aktif didalam kekuasaan atas dasar sistem demokrasi maka di dalam mengambil keputusan didalam penegakkan hukum, dan (4) untuk menjalankan kekuasaan dan bisa mengatur atas segala bentuk aturan maka hal tersebut bisa diperoleh dan mempertahankan atas pemilu yang memiliki ciri dan karakter bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara yang memiliki syarat-syarat tertentu dalam pemilu.

W.B.Gallie menandakan bahwa dia mengujar bahwa dia memiliki pandangan adanya perselisihan terhadap kerangka dari demokrasi tersebut.¹²⁰ Walaupun sangat sulit untuk dipecahkan masalah nya menggunakan argument-argument dan hanya dipertahankan dengan fakta dan bukti-bukti yang sangat layak untuk diperlihatkan.

Gallie memiliki tanggapan lain, ketika adanya orang memiliki pekerjaan atas yang didasarkan konsep yang masih diperdebatkan pengisyratan hal-hal yang berbeda dengan pemanfaatannya.

Ironisnya, di dalam konteks global menurut Eesposito, kebanyakan dari pendukung demokratisasi ini masih banyak yang belum mengakui sebagai suatu konsep yang masih sangat di berikan kajian dan perdebatan.ada halnya mereka memiliki tanggapan yang menafsirkan bahwa demokrasi itu berbeda dari segala aspek yang memiliki alternatif untuk daya penyimpangan dan tidak wajar. Dengan adanya hal ini sudah sangat tampak jelas bila dikalangan yang menjadi mayoritas pendukung demokrasi di Eropa dan AS menyatakan bahwa merekalah yang memiliki ahlis waris sejati dari satu-satunya tradisi demokrasi yang dipakai diseluruh negara. Dengan hal inilah mereka menganggap bahwa disetiap dalam upaya pihak lain agar seluruh negara menciptakan demokrasi sebagai sebuah tindakan yang sangat keliru dan sangat tidak demokratis dalam hal ini¹²¹

Menurut Enayat, di zaman ini sebuah sistem pemerinthan yang merupakan hasil dari demokrasi akan tetap melakukan diskrimin tertentu, baik secara tersirat maupun secara tersurat, yang menguntungkan kepada mereka yang memberikan kesetiaan kepada perhimpunan cita-cita, norma-norma dan lambang-lambang perbentukan dari inti sebuah konsesus yang memiliki pradugaan, pertanyaan yang muncul adalah apakah konsesus itu merupakan cara hidup di AS atau kata lain dari sosialisme secara ilmiah atau yang lebih parah demokrasi monarki liberal.¹²²

Sesuai dengan apa yang dipandangi dan yang memiliki nilai negatif ini terkait dari hubungan antara Islam dengan demokrasi, ada salah satu tokoh yang

¹²⁰ John L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi di Negara- Negara Muslim* terjemahan Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999, h. 14.

¹²¹ John L. Esposito & John O. Voll, *Demokrasi di Negara- Negara Muslim* terjemahan Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999, h. 15

¹²² Komaruddin Hidayat, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi" dalam Elsa Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia dan Masa Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 189-200.

bernama Samuel Huntington, bahwasanya ia mengemukakan konsep politik Islam itu sangat jauh berbeda dan memiliki pertentangan hingga bisa memiliki perdebatan tersendiri dengan konsep politik demokrasi Barat, Huntington mengakui bahwasanya di dalam kerangka ajaran Islam memiliki beberapa unsur yang bisa menjamin dan sesuai, dengan apa yang di paparkan dari demokrasi Barat. Dalam kebalikannya bahwa tidak ada satu negara Islam yang mampu menegakkan sistem politik demokrasi secara utuh sepanjang masa. Huntington juga mengemukakan salah satu contoh yang bisa menegakkan demokrasi ialah Mustafa Kemal dan menolak konsep Islam.

Adanya dampak dari pandangan Huntington, bahwasanya sebagian besar orang Eropa beranggapan dimana konsep demokrasi Islam ini sebuah antithema, dan memustahilkan untuk difahami dan memiliki daya tarik untuk sebuah gerakan Islam. Karenanya demokrasi ini adalah sebuah konsep yang sangat bisa dan bisa dengan dalam di perdebatkan, mesti ada kajian kajian sebagaimana persepsi demokrasi di berbagai kalangan tokoh dan kalangan gerakan kebelakangan ini.

Upaya hal pendeskripsian konsep tentang demokrasi ini merupakan sebuah cara, sikap dan respon dari apa yang ingin dilakukan oleh Umat Islam terhadapnya. Sebagaimana tanda tanya, apakah demokrasi ini sangat bisa di terapkan dan jika diterapkan seberapa jauh peranan para tokoh di kalangan umat muslim untuk menegakkan demokrasi, atukah sebaliknya apakah akan menghambat dinamika demokrasi dan dari beberapa perbedaan yang terdapat di dalam perdefinisan pandangan yang sebagaimana adanya penghinaan terhadap demokrasi, sangatlah wajar jika dari kebanyakan terutama umat muslim memiliki sikap berbeda untuk memberikan sebuah respon terhadap demokrasi, khususnya para pemikir dan para tokoh-tokoh di kalangan intelektual muslim. Dan di zaman saat ini para pemikir islam pada umumnya memiliki pandangan dan tidak kebanyakan bahwa demokrasi tidak perlu dipertimbangkan dengan nilai-nilai keislaman. Meski adanya yang harus diakui bahwa dalam nilai-nilai demokrasi ada beberapa yang tidak bisa disamakan dengan Islam karena ada beberapa hal dari beberapa point yang tidak sesuai dan untuk tidak mengatakan bertentangan dengan Islam. Di dalam Islam juga memberitakan dan membicarakan seputar doktriner karena ada beberapa point yang menyerempet dari nilai-nilai dasar demokrasi. Dan dielaborasi dengan statemen Al-Qur'an dimana ada statemen dari tokoh AS dimaksudkan nilai nilainya secara Universal memiliki karakter yang demokratis. Tema yang dimaksudkan terkait dengan Syura atau musyawarah, Ijma atau kesepakatan, dan Ijtihad atau nama lainnya penilaian interpretasi yang mandiri.

Berangkat dari adanya peluang yang sangat lebar untuk mempraktekkan demokrasi yang berbeda dengan apa yang sedang diterapkan oleh negara barat yang serta merta mengklaim sebagai negara yang paling demokratis seperti AS. Dan diharuskan di dalam mempraktekkan memiliki satu point yaitu tidak bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi.

BAB V PENUTUP

A) Kesimpulan

Berdasarkan dengan apa yang telah terurai di dalam pembahasan yang sudah dikaji di dalam penelitian kali ini.

Kritik Hamka terhadap sistem demokrasi barat yang lebih mementingkan segi akaliah dan tanpa mempeprdulikan moralitas dan tanpa perbalutan moral agama dengan menggunakan hak akaliah bahwa segala hal yang didasarkan dengan pemikira, tanpa adanya batasan dan mengedepankan kebebasan ekspresi.

Buya Hamka secara tegas menolak konsep demokrasi Barat yang menganggap bahwa semua orang memiliki hak yang sama tanpa peduli dengan moralitasnya. Bagi Buya Hamka dengan unsur tiga di dalam demokrasi ketaqwaan yang menjadi menyaring, apalagi untuk menentukan keputusan orang banyak.

Selain ide-ide politik dari Barat dan nilai-nilai Islam, hal itu juga yang memperlihatkan realitas historis yang sedang terjadi saat itu dalam konteks keindonesiaan yang berubah menjadi variabel penting yang membuat pemikiran politik Buya Hamka tampak mengalami perubahan. Sebelum kemerdekaan di dekade 1930 Buya Hamka yang sangat terbuka. Di periode ini Buya Hamka menolak formalitas yang diusulkan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Sementaradiperiode 1950-an, khususnya di Konstituante, Buya Hamka justru memperjuangkan apa yang dulu ia tolak.

Demokrasi Taqwa inilah hasil dari kritikan Buya Hamka terhadap sistem demokrasi Barat dengan segala pertentangan penolakan Buya Hamka terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi barat berupa sekularisme elitisme, hingga Syura inilah yang dipakai untuk memelihara persatuan di dalam segi agama untuk membentengi dari bentuk pemerintahan otoriterisme, diktatorisme dalam rang kamembunuh hak-hak kemerdekaan berpolitik.

Adapun unsur yang terdapat di dalam Demokrasi Taqwa ada tiga unsur : *Pertama*, khalifah di muka bumi. *Kedua* adalah syura dan Demokrasi. *Ketiga*, masyarakat yang bertaqwa.

Karena masih berupa bersifat umum, jika adahal yang mempertanyakan bagaimana Demokrasi Taqwa ini beroperasi, Buya Hamka tampakna tidak secara ekstrem menggunakan institusi demokrasi seperti Wilayahul Faqih ala Iran. Karena banyak hal yang mengharuskan elaborasi lebih lanjut.

B) Saran

Menyadari akan kekurangan penulis adalah seorang yang masih bisa melakukan kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna dan setidaknya penulis dalam skripsi ini memberikan gambaran yang memadai dan bisa dikembangkan secara menyeluruh agar bisa menjadi penitikan fokus yang lebih baik lagi, apa yang sudah di buka dan kulik kembali dari karya-karyanya dan jejak Buya Hamka, agar pemikiran sebagai tokoh yang memiliki pengaruh sangat besar dan sebagai intelektual, cecikiawannya yang memiliki pemikiran kritis kearah demokrasi Barat dan pemisahan antara agama dan Negara sertamemperhatikan nilai sekulerisme nyata baik dilihatnya secara utuh.

Pada penelitian yang penulis teliti, ada beberapa pandangan Buya Hamka terkait tema penelitian yang tidak dijelaskan secara menyeluruh, secara pandangan Buya Hamka terhadap konsep agama, manusia, konsep kebijaksanaan, konsep keadilan, konsep ummat. Ada faktor yang menyebabkan atas keterbatasan penulis baik penguasaan maupun sumber yang tidak dibukukan oleh Buya Hamka.

Sosok Buya Hamka memiliki pandangan yang tidak kalah ekstrim untuk pandangannya dari penggunaan institusi demokrasi seperti apa yang dilakukan oleh Wilayatul Faqih ala Ira, karena bagi peneliti perlu adanya bahan yang sangat banyak agar bisa mengelaborasi ke tahap selanjutnya.

Di dalam penelitian, dalam mengemukakan analisa ilmiah yang memiliki sifat penelitian yaitu kepustakaan masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu perlu adanya saran-saran agar bisa menambahkan dan membangun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adian Husaini, (2005) *Wajah Peradaban Barat* .Jakarta : Gema Insani,
- Afan Gaffar, (1999) *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, :Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ahmad Suhelmi,(2002) *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, Jakarta: Teraju
- A. Ubaedillah & Abdul Rozak, (2010) *Pacasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* : Indonesian Center For Civid Education
- Ai Fatimah Nur Fuad, Anang Rahwiyana, Ilham Mundsir, M. Abdul Halim Sani, Muhih Rosyid,Yusuf, Rifma Ghulam Dzaljad, Imron Ensiklopedia Buya Hamka,(Suara Muhammadiyah)
- Akmal Rizki Gunawan, (2016)*Dimensi Politik Tafsir al-Azhar Buya Hamka: Kajian Nilai-nilai Pancasila* (Ciputat: Cinta Buku Media)
- Azyumardi Azra,(2016) *Transformasi Politik Islam : radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi* (Jakarta : Prenada & PPIM UIN Jakarta)
- Bahtiar Effendy, (1996) *Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa Yang Memungkinkan dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (eds.)*, Agama dan Dialog Antar Peradaban, Jakarta
- Barry Holden, Democracy, dalam William Outhwaite (Ed), (2008) *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern*, alih bahasa Tri Wibowo (Jakarta: Prenada Media Group)
- Bernard Lewis,(2002) *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun sinergi warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global* (Jakarta: Paramadina)
- Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, (2012) *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara) cet 12
- David Beetham dan Kevin Boyle, (2000) *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, (Yogyakarta: Kanisius)
- David Held,(1987) *Models of Democracy*, (Stanford, Calif: Stanford University Press,)
- Dwi Susanto, Lekra, Lesbumi, Manifes (2018) *Kebudayaan: Sejarah Sastra Indonesia Periode 1950-1965*, (Yogyakarta: CAPS)
- Francis Fukuyama, (1992)*The End of History and The Last Man*, Publication. (Penguin).
- H. Rusyd Buya Hamka, (2018) *Pribadi & Martabat Buya Hamka*, (Jakarta : PT. Mizan Publika)
- Haidar Mustofa, (2018) *Buya Hamka Sebuah Novel Biografi*(Penerbit Imania Tangerang Selatan)
- Hasan, Fuad. (2006). *Pengantar Filsafat Barat*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Buya Hamka,(1982) *Ayahku : Riwayat Hidup Buya Hamka dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera* (Jakarta : Umminda)

- Buya Hamka,(2002) *Dari Hari Ke Hati, Tentang Agama, Sosial, Budaya dan Politik* (Jakarta: Pustaka Panjimas)
- Buya Hamka,(2019) *Di Tepi Sungai Dajlah*, (Jakarta: Gema Insani)
- Buya Hamka, (2015) *Falsafah Hidup*, (Jakarta: Republika)
- Buya Hamka,(1939) *Hoekom Kesopanan dan Hoekoem Politiek* (Habis),^c dalam *Pedoman Masyarakat*, edisi 27 September.
- Buya Hamka. (1946) *Islam dan Demokrasi*. Bukittinggi – Medan: Firma Tjerdas..
- Buya Hamka.(1984) *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Buya Hamka.(1951) *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Jakarta: Widjaja.
- Buya Hamka, (2018) *Kenang-Kenangan Hidup* (Jakarta : Gema Insani)
- Buya Hamka, (2015) *Lembaga Hidup*, (Jakarta: Republika).
- Buya Hamka, (1992) *Pandangan Hidup Muslim*, (Jakarta: Bulan Bintang,)
- Buya Hamka,(1956) *Pelajaran Agama* (Jakarta: Bulan Bintang)
- Buya Hamka,(2002) *Renungan Tasawuf*, (Jakarta: Pustaka Panjimas,).
- Buya Hamka,(1972) *Renungan Tasawuf*, Lihat Buya Hamka, *Harapan Kepada Pemuda*,^c dalam Panji Masyarakat, no 108, tahun XIII, 1 Agustus
- Buya Hamka, *Riwajat Ringkas Pemerintahan Islam III*
- Buya Hamka,(1983) *Studi Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas,)
- Buya Hamka,(2019) *Studi Islam*,; Tim Penulis, *Ensiklopedia Buya Hamka*, (Jakarta: Suara Muhammadiyah)
- Buya Hamka,(2015) *Tafsir al-Azhar jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani)
- Buya Hamka,(1950) *Tjahaja Baru*, (Medan: Pustaka Nasional)
- Buya Hamka. (2003) *Umat Islam Menghadapi Tantangan Kristenisasi dan Sekularisasi*. Jakarta: Pustaka Panjimas,.
- Buya Hamka,(1952) *Urut Tunggang Panjtasila* (Jakarta : Pustala Keluarga)
- Khairudin Aljunied,(1952) *Buya Hamka & IslamI*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah)
- Konstituante Republik Indonesia. Risalah Perundingan Tahun 1959 Djilid I.
- Hossoubah, (2004) *Cara Berfikir Kreatif dan Kritis*, Bandung: Yayasan Nuansa Cendia,
- James R Rush, Adicerita, (2017) *Buya Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern*, penerjemah Zia Anshor (Jakarta: Gramedia),
- James R Rush,(2016) *Buya Hamka's Great Story: A Master Writer's Vision of Islam for Indonesia* (Madison: University of Wisconsin Press),
- John L. Esposito & John O. Voll,(1999) *Demokrasi di Negara- Negara Muslim* terjemahan Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan)
- J.Supranto,(2003) *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Jakarta: PT RINEKACIPTA)

- Komaruddin Hidayat, (1994) “*Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi*” dalam Elsa Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia dan Masa Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina),
- Kuntowijoyo, (2001) *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan)
- Kuntowojoyo, (1997) *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan)
- Mashad, Dhurorudin, (1999) *Menggugat Penguasa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga)
- Masykuri Abdillah, (2015) *Islam dan Demokrasi*, (Jakarta: Prenadamedia),
- Mertes, (1991) *Thinking and Writing*, di dalam *Jurnal Middle School* 22, Yogyakarta:
- Muhammad Aqil Irham, (2016) *I Demokrasi Muka Dua : Membaca Ulang Pilkada di Indonesia* (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia)
- Muhammad Rizza Sihbudi, (2004) “*Islam, Radikalisme dan Demokrasi*” (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
- Munawir Sjadzali, (1993) *Islam dan Tata Negara: Ajaram, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta : UI Press)
- M. Iqbal Hasan, (2002) *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, (2007) *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga),
- Mohamad Roem, (1983) *Bunga Rampai Dari Sejarah 3*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- N. Mitchell dan William C. Mitchell, (1969) *Politics and the Social Sciences : An Introduction to Political Science*, Rand McNally & Co
- Nyoman Dantes, (2012) *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi)
- Remy Madinier, (2013) *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral*, penerjemah Tonny Pasuhuk, (Bandung: Mizan)
- R Rush, (2017) *Adicerita Buya Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar Untuk Indonesia Modern*, penerjemah Zia Anshor (Jakarta: Gramedia).
- SP. Varma, (2010) *Teori Politik Modern* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada)
- Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, (2019) *Bagaimana Demokrasi Mati*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama)
- Suharsimi Arikunto, (1990) *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Sumadi Suryabrata, (2005) *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Suhelmi, Ahmad. (2001). *Pemikir Politik Barat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- William F. Allen, (1977) *Sexuality Summary*, (Ohio, Alba House Communications)
- Yudi Latif, (2012) *Inteligensia Muslim dan Kuasa*, (Jakarta: Democracy Project,)
- Yusril Ihza Mahendra, *Ensiklopedi Pemikiran Yusril Ihza Mahendra 3*, (Jakarta: Pro Deleader, tt),

Zulfikri Suleman,(2010) *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta, Kompas,

Sumber Jurnal

Abd Khair,(1996) ,*Pembaharuan Pemikiran Buya Hamka Dalam Bidang Aqidah, Tasawuf dan Sosial Politik*’, disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah,

Abdul Nashir, (2016) ,*Buya Hamka dan Mohammad Natsir Tentang Pendidikan Islam*’, *At-Ta’dib*, vol 3, no 1,

Abdul Wahid, ,*Sosial Politik Dalam Tafsir Buya Hamka*’, *Conference proceedings*, Ar-Raniry International Conference on Islamic Studies (ARICIS) I, Banda Aceh,

A.B. Kusuma,(2009) *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Achmad Suja’i,(2000) ,*Konsep Khilafah Dalam Tafsir Sayyid Quthb dan Tafsir Buya Hamka*’, disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Ahmad Hakim dan M Thalhah,(2005) *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Buya Hamka*, (Yogyakarta: UII Press)

Alferd Cobban,(1953) *Ethics and Decline of Political Theory*” dalam *Political Science Quarterly*, LXVIII.

A Syafii Maarif, ,*Buya Hamka: Pribadi Multitalenta, Minangkabau dan Indonesia*

Aidul Fitrijadiada Azhari,(2005) *Menemukan Demokrasi*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press)

Ajat Sudrajat, *Pemikiran Hatta Tentang Demokrasi Kerakyatan*, Skripsi UNY

Fokky Fuad, *Moral Hukum dan Nilai Nilai Kebangsaan: Sebuah Refleksi Pemikiran Buya Hamka*, (Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol 16, Nomor 1 Tahun 2016)

Fokky Fuad, ,*Kehancuran Nilai Kemanusiaan Reaktualisasi Pemikiran Buya Hamka Dalam Hukum*’, *Lex Journalica*, vol 13, no 1, 2016

George Barna, *What Americans Believe*, (California: Regal Books, 1991)

Buya Hamka, ,*Khilafaat*,’ dalam *Panji Masyarakat*, no 195, tahun XVII, 15 Maret 1976

Buya Hamka, ,*Parlement dan Doenia Islam I*,’ dalam *Pedoman Masyarakat*, no 1, tahun VII, 1 Januari

Buya Hamka, ,*Perbandingan Sedjarah*’, dalam *Hikmah*, no 15-16, tahun V, 16 April 1952

Buya Hamka, ,*Perbandingan: Hoekoem Kesopanan dengan Hoekoem Politiek (Habis)*’, dalam *Pedoman Masyarakat*, edisi 27 September 1939,

Buya Hamka, ,*Siapa Anti Pantjasila!*,’ dalam *Pandji Masyarakat*, no 4, tahun I, 20 November 1966

Heri Herdiawanto, *Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Buya Hamka tentang Demokrasi dan Dasar Negara Pancasila* disertasi , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021

Holden, Barry. (2008). *Democracy dalam William Outhwait, Ensiklopedi pemikiran Sosial Modern*, Penerjemah Tri Wibowo, B.S, Jakarta: Prenada Media Group

Imam Taufiq,(2014) ,Membangun Damai Melalui Mediasi: Studi terhadap Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar', *Jurnal al-Tahrir*, vol 14, no 2.

John Henry Wigmore,(1917) *Problems of the law's Mechanism in Amerika*, (Vrginia Law Review), Vol. 4 No. 3

Marsudi Fitro Wibowo, (2018),*Relasi Agama dan Negara Perspektif Ulama Indonesia (Konstruksi Gagasan Politik Islam Buya Hamka Pada Tahun 1928-1981)*', disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

Muhammad Hilmi Jalil dan Fakhru Adabi Abdul Kadir,(2013),Kepentingan Kesehatan Diri Dalam Pembangunan Insan: Analisis Karya Falsafah Buya Hamka', *Jurnal Hadari*, vol 5, no 2.

M Roem Rowi, ,(2009) *Buya Hamka Wujuduhu fi Tafsir al- Qur'an al-Karim bi Indunisy fi Kitabihi al-Azhar'*, *Journal of Indonesian Islam*, vol 03, no 2
Nugroho Notosusanto, (1991). *Pejuang dan Prajurit*. Sinar Harapan. Jakarta.

Nunu Burhanuddin, (2015) ,Konstruksi Nasionalisme Religius: Relasi Cinta dan Harga Diri Dalam Karya Sastra Buya Hamka', *Episteme*, vol 10, no 2.
Ni'matul Huda,(2013) *Ilmu Negara*, (Jakarta,:PT Raja Grafindo Persada)

Ni'matul Huda, (2005) *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press)

Nunu Burhanuddin, (2015),*Konstruksi Nasionalisme Religius: Relasi Cinta dan Harga Diri* Dalam Karya Sastra Buya Hamka', *Episteme*, vol 10, no 2.

Riska Muazzinah,(2019) *Konsep Demokrasi(Studi Komparatif antara Pemikiran Abul A;la Maududi dan Prakteknya di Indonesia)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Salman Alfarizi,(2010) *Mohammad Hatta Biografi Singkat*. Jogjakarta : Garansi.

Shofwan Rozi dan Heriwanto,(2019) *Demokrasi Barat: Problem dan Implementasi di Dunia*,(Jurnal Al-Aqidah, Volume 11, Edisi 2, Desember)

Shobahussurur, (2009),Relasi Islam dan Kekuasaan Dalam Perspektif Buya Hamka', *Jurnal Asy-Syir'ah*, vol 43, no 1.,

Sidik,(2012) ,Deradikalisasi Pemaknaan Negara dan Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar', *Jurnal Analisa*, Vol 19, No 1.

Taufik Abdullah,(1996) *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES)

Teuku May Rudy,(1999) *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hikmah),

Toha Andika,(2017) *Syura dan demokrasi Barat: Kritik dan solusi menuju demokrasi islam*, (Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam AL-IMARAH Vol. 2, No. 2.

Tony & Barry Buzan,(2004) *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium,(Jakarta: Interaksara)

Yolandi Ataupah,(2012) *Analisis Panggilan Yehezkiel Sebagai Penjaga Israel Berdasarkan Teori Kritik Sosial*, Skripsi, Salatiga: UKSW.

Yuyun Affandi,(2010) “*Konsep Demokrasi Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*”,*Laporan Penelitian Individu*, (Semarang: IAIN Walisongo,),

Yudi Latif,(2012) *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, (Jakarta: Democracy Project.)

Zul `Azmi Yaakob, ,*Falsafah Alam*(2011) Dalam Konteks Falsafah Ketuhanan Menurut Buya Hamka’, *International Journal of Islamic Thought*, vol 1, June

Sumber Internet

[https://panjimasyarakat.com/2021/07/27/Buya Hamka-pemikiran-politik-dan-demokrasi/](https://panjimasyarakat.com/2021/07/27/Buya-Hamka-pemikiran-politik-dan-demokrasi/)

<http://www.gomuslim.co.id/read/destinasi/2016/11/27/2344/berkunjung-ke-museum-rumah-kelahiran-buya=Buya Hamka=ditepian-danau-maninjau.html>

<https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>

Majalah The Economist edisi 28 Februari- 5 Maret 2004

Piagam Jakarta 22 Juni 1945, (Jakarta: Rajawali, 1983)

Buya Hamka, 'Diri Ini Telah Terdjual,' dalam Pandji Masjarakat, no 69, tahun IV, Desember 1970



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-0172/ Un.16 / P1 /KT/V/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

KRITIK BUYA HAMKA TERHADAP SISTEM DEMOKRASI BARAT
Karya

| NAMA | NPM | FAK/PRODI |
|----------------------------|------------|-----------|
| MUHAMMAD RAFI DZULFIQRI | 1831040077 | FUSA/PPI |

Bebas Plagiasi sesuai Cek dengan tingkat kemiripan sebesar **24%**. Dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 17 Mei 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

09052023

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 24% | 19% | 2% | 12% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper | 6% |
| 2 | ia801705.us.archive.org Internet Source | 2% |
| 3 | etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | repository.ptiq.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | ojs.uma.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | www.alislamu.com Internet Source | 1% |
| 8 | cvmandirikreatif.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 9 | ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source | 1% |
| 10 | journal.uinjkt.ac.id Internet Source | 1% |

| | | |
|----|---|------|
| 11 | fliphtml5.com Internet Source | <1 % |
| 12 | ejournal.uinib.ac.id Internet Source | <1 % |
| 13 | jurnal.iainambon.ac.id Internet Source | <1 % |
| 14 | repository.ar-raniry.ac.id Internet Source | <1 % |
| 15 | Samsul Bahri. "HAM DAN AKTUALISASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM", ALQALAM, 2016 Publication | <1 % |
| 16 | dspace.uii.ac.id Internet Source | <1 % |
| 17 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper | <1 % |
| 18 | panjimasyarakat.com Internet Source | <1 % |
| 19 | repository.uinbanten.ac.id Internet Source | <1 % |
| 20 | repository.umy.ac.id Internet Source | <1 % |
| 21 | core.ac.uk Internet Source | <1 % |
| 22 | www.lontar.ui.ac.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 23 | archive.org Internet Source | <1 % |
| 24 | eliamonikasofyan.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 25 | 123dok.com Internet Source | <1 % |
| 26 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | <1 % |
| 27 | Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper | <1 % |
| 28 | atik085641095564.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 29 | Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper | <1 % |
| 30 | www.jurnal.iainambon.ac.id Internet Source | <1 % |
| 31 | qdoc.tips Internet Source | <1 % |
| 32 | repository.radenfatah.ac.id Internet Source | <1 % |
| 33 | b-ok.org Internet Source | <1 % |
| 34 | etheses.uinmataram.ac.id Internet Source | <1 % |

| | | |
|----|---|-----|
| 35 | jurnal.um-palembang.ac.id Internet Source | <1% |
| 36 | pai.iaingorontalo.ac.id Internet Source | <1% |
| 37 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | <1% |
| 38 | docobook.com Internet Source | <1% |
| 39 | docslib.org Internet Source | <1% |
| 40 | ourmashop.wordpress.com Internet Source | <1% |
| 41 | www.dakta.com Internet Source | <1% |
| 42 | ar.scribd.com Internet Source | <1% |
| 43 | ojs3.unpatti.ac.id Internet Source | <1% |
| 44 | repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source | <1% |
| 45 | repository.uinjkt.ac.id Internet Source | <1% |
| 46 | e-journal.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source | <1% |
| 47 | zharifalimin.blogspot.com Internet Source | <1% |

| | | |
|----|---|------|
| 48 | Muhammad Taufik. "POLEMIK PENAFSIRAN DALAM HUBUNGAN SYURA DAN DEMOKRASI", Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2021 Publication | <1 % |
| 49 | agushasanbashori.com Internet Source | <1 % |
| 50 | alzubillacenter.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 51 | eprints.ums.ac.id Internet Source | <1 % |
| 52 | watawasoubilhaqqi.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 53 | LexisNexis Publication | <1 % |
| 54 | repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source | <1 % |
| 55 | www.goodreads.com Internet Source | <1 % |
| 56 | alirsyadsurabaya.org Internet Source | <1 % |
| 57 | digilib.uinsby.ac.id Internet Source | <1 % |
| 58 | text-id.123dok.com Internet Source | <1 % |
| 59 | Submitted to Bellevue Public School | |

Student Paper

<1 %

60

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

61

ejournal.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

62

v1.mpr.go.id

Internet Source

<1 %

63

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati
Bandung

Student Paper

<1 %

64

Submitted to Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati

Student Paper

<1 %

65

osimilikiti.blogspot.com

Internet Source

<1 %

66

repository.usd.ac.id

Internet Source

<1 %

67

www.tribunnewswiki.com

Internet Source

<1 %

68

Submitted to Universiti Kebangsaan
Malaysia

Student Paper

<1 %

69

blogminangkabau.wordpress.com

Internet Source

<1 %

70

journal.iaingorontalo.ac.id

Internet Source

<1 %

| | | |
|----|---|------|
| 71 | Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper | <1 % |
| 72 | edhacidam.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 73 | harun-bassammedia.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 74 | iqbalunimed.files.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 75 | journal.lppm-unasman.ac.id Internet Source | <1 % |
| 76 | makmureffendi.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 77 | mengaisilmu.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 78 | Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper | <1 % |
| 79 | library.jakarta.bawaslu.go.id Internet Source | <1 % |
| 80 | www.materibelajar.id Internet Source | <1 % |
| 81 | conference.kuis.edu.my Internet Source | <1 % |
| 82 | download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source | <1 % |

eprints.uny.ac.id

| | | |
|----|---|------|
| 83 | Internet Source | <1 % |
| 84 | kelembagaandas.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 85 | radikalmoonblog.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 86 | repository.uhamka.ac.id Internet Source | <1 % |
| 87 | tausyiah275.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 88 | tentanghamka.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 89 | uika-bogor.ac.id Internet Source | <1 % |

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On